

PERAN POLITIK DEWAN MUFTI DI RUSIA

Nur Tafsir

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: nur tafsin@yahoo.com*

Abstrak: *Dewasa ini, Rusia sebagai bekas negara warisan Uni Soviet memulai sejarah baru sebagai negara demokrasi. Perubahan yang utama terjadi ketika kebebasan beragama dimasukkan dalam konstitusi. Konstitusi baru Rusia menegaskan bahwa negara membebaskan rakyatnya untuk memeluk, menyebarkan, dan mengajarkan agama yang diinginkan. Islam dan Rusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya memiliki hubungan dalam perspektif sejarah. Runtuhnya Uni Soviet memberikan harapan baru bagi rakyat Rusia. Umat Islam pada masa ini memasuki era baru dimana dapat menjalankan aktivitas keagamaan kembali setelah vakum selama kurang lebih 70 tahun. Runtuhnya Uni Soviet juga meninggalkan permasalahan bagi umat Islam yang sangat kompleks dalam berbagai sisi kehidupan. Selain itu, Kebutuhan beragama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Latar belakang inilah yang menjadikan lahirnya Dewan Mufti di Rusia. Lahirnya Dewan Mufti diharapkan dapat memberikan solusi akan kepentingan umat Islam. Tipe pemikiran Dewan Mufti di Rusia dapat dikategorikan sebagai kelompok moderat. Dewan Mufti lebih mengupayakan jalan-jalan damai dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ideologi sekuler yang dipilih oleh Rusia dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghindari diskriminasi umat, karena negara Rusia terdiri dari berbagai macam kelompok agama dan aliran kepercayaan. Dewan Mufti memiliki peran yang penting bagi umat Islam sendiri dan bagi pemerintah Rusia. Fatwa dibutuhkan untuk membantu memecahkan permasalahan Umat yang sangat beraneka ragam. Sedangkan bagi Pemerintah, pada saat tertentu dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan agar nantinya dapat diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik.*

Kata Kunci: *Peran Politik, Dewan Mufti, Rusia*

A. Pendahuluan

Islam di Rusia sudah ada semenjak berabad-abad yang lalu. Sumber yang kuat mengatakan, bahwa Islam masuk ke Rusia berkisar abad ke-7 M.¹ pada saat itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW berkunjung ke sebuah kota bernama Derbent, yang sekarang masuk di wilayah Republik Dagestan. Kemudian, Islam di adopsi oleh negara Volga Bulgar (sekarang disebut Tatarstan) pada tahun 922 atau 66 tahun lebih awal sebelum agama Orthodox (988) oleh Tsar Vladimir. Jadi, Islam di Rusia lebih tua dibandingkan Orthodox yang kini menjadi mayoritas. Sejak saat itu telah terjadi berbagai kejadian dalam bentuk perang dan kemitraan serta penguasaan satu dengan lainnya.

Pada tahap selanjutnya, Rusia pernah diperintah oleh beberapa Kesultanan dan Islam pernah dijadikan agama resmi negara. Diantaranya pada masa Kesultanan Khan-an dan Kesultanan Timurlane pada tahun 1395. Timurlane adalah muslim keturunan Tartar yang memerintah di Samarkand. Kemudian pada tahun 1552, diperintah oleh Ivan Grozny (1530 - 1584), pada masa ini terjadilah Perang Salib Rusia dengan Dunia Islam. Pasukan Mongol juga pernah menguasai Rusia dan terakhir dikuasai oleh Dinasti Romanov (1613 - 1917). Masa Uni Soviet merupakan masa dimana Umat Islam mengalami tekanan yang luar biasa, dimana segala macam bentuk peribadatan dilarang selama kurang lebih 70 tahun. Setelah Uni Soviet runtuh, segala macam bentuk kebebasan berkobar dimana-mana, dalam hal ini kebebasan dalam beragama.

Revolusi yang terjadi diakhir abad dua puluh telah membawa kehancuran uni Soviet yang telah dibangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa. Uni Soviet secara resmi berakhir pada tanggal 25 Desember 1991 ketika Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran diri menyusul kemelut politik sebagai kelanjutan kudeta yang gagal pada pertengahan Bulan Agustus 1991.² Hancurnya Uni Soviet merupakan titik awal dari kehancuran Total Rusia yang hingga kini masih digerogoti gejala-gejala disintegrasi.

Terjadinya krisis ekonomi, konflik antar etnis dan agama merupakan beberapa faktor dari pecahnya Uni Soviet. Pasca runtuhnya Uni Soviet terbentuklah sebuah Negara Rusia baru yang demokratis. Secara resmi, kemerdekaan rusia di proklamirkan pada tanggal 12 Juni

¹ Aji Surya, Frassminggi Kamasa, *Geliat Islam di Rusia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 23.

² A. Fahrurroddi, *Rusia Baru Menuju Demokrasi Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 189.

1990 dalam sidang I Majelis Permusyawaratan Rakyat Soviet Rusia. Setelah memproklamkan kemerdekaannya, Rusia baru melakukan reformasi dibidang ekonomi dan sosial, momentum ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memulai kembali aktivitas keagamaan mereka.

Setelah berdirinya Negara Rusia Baru, pada tahun 1996 didirikanlah sebuah organisasi Islam yang bertujuan untuk menyatukan komunitas-komunitas Muslim yang ada di Rusia. Organisasi Tersebut ialah Dewan Mufti Rusia. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial politik dan sebagai penghubung komunikasi dengan Pemerintah Rusia. Organisasi ini lahir dilatarbelakangi oleh semangat kebangkitan Umat Islam di Rusia. Umat Islam di Rusia yang tersebar diseluruh negeri mulai menyadari akan pentingnya sebuah organisasi dewan agama di semua daerah. Diharapkan dengan didirikannya Dewan Mufti Rusia semua kebutuhan beragama yang demikian kompleks bisa terpenuhi.

Didirikannya Dewan Mufti Rusia diharapkan dapat mempermudah penyelesaian berbagai permasalahan umat Islam yang sangat kompleks. Tugas - tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Mufti Rusia diantaranya membangun masyarakat Islam dari berbagai sisi bidang kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, Tempat Peribadatan, zakat, infaq, serta menjadi jalur untuk komunikasi dengan Pemerintah maupun organisasi di dalam dan luar negeri. Disamping hal-hal tersebut, Dewan Mufti Rusia juga dihadapkan pada Masalah-masalah yang berkaitan dengan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Rusia diantaranya: aksi-aksi terorisme, dan gerakan-gerakan separatis Islam seperti yang terjadi di Chechnya, Dagestan, dan Ingushetia.

Pengertian separatis sendiri adalah suatu kelompok nasionalis yang mencoba melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk sebuah negara baru. Separatisme memang menjadi kecenderungan dari sekitar 170 negara-bangsa yang memiliki penduduk minoritas. Meskipun sudah berasimilasi cukup lama, banyak kelompok yang masih merasa terpisah dan berbeda. Rasa berbeda ini berkembang menjadi gerakan separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk suatu negara yang berdiri sendiri, atau tidak jauh dari bentuk ekstrim ini, sebatas otonomi internal yang bebas dari pengaturan negara induk.³

Konflik yang terjadi antara Chechnya dan Rusia telah terjadi. Dalam catatan sejarah Hubungan Chechnya dan Rusia sudah terjalin semenjak

³ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993) hlm. 184-185

abad ke 16 hingga 17 dimana Rusia pada waktu itu hendak meluaskan pengaruh politik dan ekonomi ke wilayah Chechnya. Hingga sampailah pada masa Uni Soviet runtuh konflik Rusia dan Chechnya juga masih sering terjadi. Konflik yang berkepanjangan ini pada intinya ialah Chechnya menuntut kebebasan dan kemerdekaan mereka dari Rusia. Dibalik tuntutan ini, di wilayah Chechnya juga bermukim sekelompok gerakan separatis yang ingin menegakkan syariah Islam berdiri di Chechnya. Rusia melakukan serangan besar-besaran untuk memberantas gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari kedaulatan Rusia. Pada masa inilah terjadi Perang Chechnya I periode 1994 - 1996 dan Perang Chechnya II pada tahun 1999.

Periode selanjutnya ialah ketika Presiden Vladimir Putin berkuasa. Pada masa-masa konflik yang terjadi antara Rusia dan Chechnya sudah mulai mereda. Ditandai dengan Referendum pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Chechnya dan pada akhirnya menyetujui sebagai negara bagian dan bergabung kedalam negara Federasi Rusia. Walaupun sudah menjadi bagian dari Rusia di kedua belah pihak aksi-aksi kekerasan terkadang masih sering terjadi diantara kedua belah pihak, seperti aksi bom bunuh diri. Pada saat-saat inilah, Dewan Mufti yang ada di Rusia memiliki peran untuk menyelesaikan konflik-konflik yang masih terjadi dengan jalan damai. Dewan Mufti dapat melakukan upaya-upaya damai dari berbagai sisi baik sisi, keagamaan dan sosial politik. Dewan Mufti semenjak didirikan memang cenderung mengarah kepada organisasi yang bersifat sosial, sehingga diharapkan tidak berpihak kepada Chechnya, Rusia, atau kelompok separatis. Akan tetapi, lebih pada upaya menyatukan hubungan berbagai pihak dalam bingkai toleransi beragama. Berdasarkan uraian tersebut, Penyusunan tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Dewan Mufti Rusia dan peranannya dalam konflik-konflik yang terjadi antara Rusia dan Chechnya maupun konflik-konflik yang terjadi di Rusia yang mengatasnamakan keagamaan.

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta tidak signifikan, maka penulis akan membatasi fokus penelitian pada Peran Politik Umat Islam dalam Perpolitikan Di Rusia pasca Runtuhnya Uni Soviet. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apa tipe tipe pemikiran Dewan Mufti di Rusia ? Apa urgensi fatwa bagi keberadaan Umat Islam di Rusia ?

B. Tipologi Pemikiran Politik dalam Islam

Setiap zaman memiliki sejarah yang berbeda, pemikiran-pemikiran

yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda juga. Islam yang diklaim sebagai agama yang komprehensif, baik dari kalangan intern maupun kalangan ekstern bahkan orientalis sekalipun juga mempunyai cerita tersendiri dalam sejarah ketata negaraannya. Nabi SAW telah memiliki konsep dasar dalam bernegara yaitu adanya negara Madinah, yang dianggap merupakan praktek bernegara pertama yang dilakukan Nabi. Konsep yang diterapkan diantaranya: Hak Azazi Manusia, serta penanaman sikap tenggang rasa antar sesama umat beragama. pada saat itu umat Yahudi juga berdampingan dengan umat Islam di Madinah.

Selesai zaman kenabian yang ditandai dengan wafatnya Rasulullah SAW, perkembangan Islam dalam sejarahnya telah menunjukkan berbagai varian. Varian- varian tersebut berupa visi, metode, dan kerangka berpikir yang berbeda dari pemikiran yang satu ke lainnya. Perluasan wilayah kekuasaan Islam mengakibatkan berbagai bangsa dan kebudayaan bergesekan dengan khazanah pemikiran yang dipegang oleh kaum muslim.

Didalam perkembangannya pemikiran politik Islam dapat dibagi dalam 3 macam, Yakni periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke -13 (1258 M), periode pertengahan berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-19 (periode kejatuhan Abbasiyah hingga zaman kolonialisme), dan periode modern yang berlangsung sejak abad 19 (kolonialisme) hingga sekarang.

1. Tipologi Pemikiran Era Klasik

Pertumbuhan pemikiran politik Islam, dalam periode awal banyak dipengaruhi oleh pergulatan kepentingan keagamaan. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan Islam. Masa awal pada periode ini dimulai di masa nabi Muhammad SAW, masa dimana seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah keluar Arabia dimulai di zaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq hingga masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebagai puncak kejayaan Islam.

Pada masa awal-awal Islam hingga masa Dinasti Umayyah, pemikiran politik Islam belum begitu kuat muncul di kalangan intelektual Islam, meskipun sudah ada gerakan oposisi dari kelompok Khawarij dan Syi'ah. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Barulah pada masa Dinasti Abbasiyah pemikiran politik Islam dikembangkan oleh sejumlah intelektual islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang.

Ciri yang mendasar dari pemikiran ini ialah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kendali kekuasaan dan mampu memberikan pengaruh di tingkat internasional. Ciri yang menonjol dari karakteristik pemikiran politik klasik diantaranya: *Pertama*, pengaruh pikiran Yunani, terutama pandangan Plato tentang asal-usul negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama. Plato dalam teorinya menyatakan bahwa negara terbentuk karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh kekuatan dan kemampuan sendiri, akal manusia bekerja sama dan bersatu. Persekutuan hidup dan kerja sama yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini kemudian diambil para pemikir politik Islam sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara, seperti yang terlihat dari karya Ibnu Abi Ar-Rabi' dalam *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyah fi al-wilayah al-Diniyah* serta Al-Farabi dalam *Al-Madinah Al-Fadhiblah* dan *Ahl-Al Madinah Al Fadhiblah*. Interaksi dengan pemikiran Yunani ini tampak menonjol dalam masa-masa pemerintahan kekhilafahan Abbasiyah.

Pandangan Ibnu Abi Ar-Rabi', dalam beberapa hal juga mendapat dukungan dari Al-Ghazali (1058-1111M). Al-Ghazali, dalam kitabnya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, menyebutkan bahwa kekuasaan kepala negara adalah kudus (suci). Karenanya, umat tidak boleh memberontak terhadap kekuasaan. Pemikiran ini berbeda dengan Al-Mawardi (975-1059) yang memungkinkan pemecatan kepala negara dari jabatannya. Al-Mawardi juga mengemukakan teori "kontrak sosial" antara kepala negara dan rakyatnya. Karena kepala negara diangkat melalui kontrak sosial, maka Al-Mawardi meniscayakan adanya pemberhentian kepala negara dari jabatannya.

Kedua, pemikiran politik yang berkembang lebih banyak pada kondisi realistik sosial-politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik yang terjadi. Bahkan di antara pemikir ada yang mendasarkan gagasannya pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada atau mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa, baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi,⁴ seperti dalam karya Ibnu Abi Ar-Rabi' (833-842M) dalam *Suluk al-Malikefi Tadbir al-Mamalik*.

Ketiga, pemikiran politik pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini,

⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Islam: Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 10

kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politik mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing (terutama Yunani Kuno) ke dalam Islam, gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing.

2. Tipologi Pemikiran Era Pertengahan

Periode pertengahan dapat dikelompokkan kedalam dua masa; yakni, masa kemunduran Islam akibat serangan yang dilakukan oleh tentara mongol dan Munculnya tiga kerajaan besar Usmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Masing-masing dari ketiga kerajaan tersebut memiliki karakter yang berbeda tetapi memiliki spiritualitas Islam yang sama. Imperium Mongol mencerminkan rasionalisme, filosofis, universalis, dan toleran. Kerajaan Safawi menerapkan paham syiah sebagai menjadi agama negara. Sedangkan dinasti Usmaniyah bermadzhab suni, menciptakan masyarakat politik berdasarkan syariat. Ketiga kerajaan ini merupakan institusi moderen yang diperintah secara sistematis dengan pendekatan rasional dan birokratis.

Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol yang mengakibatkan peradaban Islam yang telah dibangun maju hancur akibat penyerangan tentara Mongol. pemikir politik Islam pada periode ini mencerminkan kecenderungan reponsif-realis terhadap kejatuhan dunia Islam. Beberapa intelektual yang muncul pada masa ini adalah: *Ibnu Taimiyah yang menulis al-siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al Ra'iyah* dan Ibnu Khaldun yang menulis *Muqaddimah*.

Pemikiran politik Ibnu Taimiyah bertumpu pada dua hal, yakni *al-amanah* (kejujuran) dan *al-qummah* (kekuatan) sebagai syarat mutlak kepala Negara. Menurutnya jika dalam suatu *walayat* (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanah, orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanah adalah yang lebih pantas menduduki posisi kepala negara.⁵ Ibnu Taimiyah merupakan tokoh konservatif yang dilahirkan di Damaskus (1263-1328 M) yang melakukan gerakan reformasi (*Islah*) dan pembaharuan (*Tajdid*). Ia hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi moral, dimana kekuasaan tidak lagi di tangan khalifah yang berada di Bagdad, melainkan oleh penguasa lokal. Jatuhnya Bagdad ke tangan Mongol mengakhiri dinasti Abbasiyah dan ini merupakan klimaks proses disintegrasi. Ia memandang bahwa teori khilafah tidak

⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 123.

mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam Islam. Oleh karena itu Taimiyah menjanjikan teori politik islam yang diharapkan mampu menutup keterbatasan-keterbatasan pada teori khilafah dengan merujuk kepada teori kekhilafaan klasik.

Kesejahteraan umat manusia tidak dapat sempurna tanpa kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Maka, dalam setiap kelompok manusia dibutuhkan suatu negara untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama dan untuk mensejahterakan masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menegakkan pemerintahan adalah perintah agama. Maka setiap negara harus memiliki sistem pemerintahan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dalam pemerintahan, Ibnu Taimiyah menekankan adanya praktik penyelenggaraan negara.

Ibnu Taimiyah menolak konsep negara Islam yang universal tunggal, dan sebuah prinsip yang menjadi dasar teori khilafah yang sebelumnya. Sebaliknya, ia justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan iman, meskipun berdiri beberapa negara Islam. Kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama.

Pemikir lainnya, Ibnu Khaldun yang menulis Muqaddimah merupakan respon terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya. Dalam kondisi kekuatan Islam semakin lemah. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi kemasyarakatan dan tanpa kerjasama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga manusia secara alamiah membutuhkan negara. Teori ini mirip dengan teori Plato.

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa peranan politik dalam kehidupan masyarakat amat penting dan menentukan. Politik mengajarkan suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa kehidupan politik kehidupan manusia akan kacau. Timbulnya Negara Organisasi kelompok merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu perlu adanya negara untuk mengatur lalu lintas aktivitas kerjasama untuk mengatur tujuannya. Ibnu khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan Negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Penguasa dan Kekuasaan

Kehidupan bersama dalam suatu negara memerlukan penguasa yang ditaati. Tanpa penguasa kehidupan masyarakat akan berada dalam situasi yang kacau, penuh anarki dan pada ujungnya akan mengancam eksistensi

manusia. Moralitas cukup sebagai dasar dengan argumen bahwa: adalah tidak mungkin seseorang yang tidak bermoral dapat sampai kepada kekuasaan negara. Kaitan erat antara moralitas dan penguasa ini adalah untuk menghindari pemikiran manusia yang menganggap politik itu licik dan amoral; hubungan penguasa itu adalah hubungan antara yang kuasa dan yang dikuasai; antara yang lemah dan yang kuat; antara yang menindas dan yang tertindas. Oleh sebab itu tugas politik dan tugas penguasa adalah untuk menegakkan moralitas, keadilan, kesejahteraan dan keagamaan.

3. Tipologi Pemikiran Era Modern

Periode modern ditandai oleh penjajahan barat yang melanda negeri-negeri muslim antara abad 18 - 20.⁶ Dunia islam tidak mampu bangkit dari kemunduran yang berkepanjangan. Singkatnya ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran Islam modern atau kontemporer ;

- a. Kemunduran Islam disebabkan oleh faktor-faktor internal dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian.
- b. Rongrongan barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan dunia Islam yang berakhir dengan penjajahan.
- c. Keunggulan barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.

Dalam periode ini berkembang tiga tipe pemikiran. *Pertama*, Tipologi pemikiran politik Islamic Organic tradisional atau politik klasik. *Kedua*, Tipologi pemikiran Politik Islam sekuler. Dan *ketiga*, Tipologi pemikiran Politik Islam moderat.

1. Pemikiran Politik Organik Tradisional/Integral

Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (klj^llj). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Tipologi ini juga dikenal dengan istilah paradigma Integralistik.⁷ Sedangkan Din Syamsuddin menegaskan bahwa dalam pemikiran integrasi Islam dan Negara terdapat dua bentuk paradigma. Yaitu, Paradigma *teokratis* dalam perspektif Syiah dan paradigma *teo-demokratis* dalam pespektif Maududi.

Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syari'ah Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 175184.

⁷ Marzuki Wahid, Abd. Moqsih Ghazali, "Relasi Islam dan Negara: Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama". Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10, November 2010.

sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.

Munawwir Sajdzali mengkategorikan tipologi ini sebagai tipologi konservatif. Konservatif dimaksudkan sebagai mempertahankan integrasi antara Islam dan negara karena Islam dipandang lengkap mengatur sistem kemasyarakatan, termasuk persoalan kenegaraan.⁸ Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Menurut pendekatan integralistik, Islam diturunkan sudah dalam kelengkapan yang utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap-tiap bidang kehidupan. Pandangan ini telah mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang komprehensif. Bahkan, sebagian kalangan melangkah lebih jauh dari itu; mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.

Konsep Islam dan negara yang meniscayakan kesatuan agama dan negara bersifat problematik. Dari pengamatan politik Islam memandang bahwa konsep ini bersifat monolitik, karena hanya ada satu pilihan. Padahal hubungan antara Islam dan politik pada hakikatnya bersifat organik. Islam ditempatkan sebagai sesuatu yang sejak awalnya sebagai agama politik. Hal ini tentunya merupakan suatu kekurangan lantaran tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif yang memungkinkan penafsiran mengenainya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan Umat Islam dewasa ini yang memiliki keragaman sosial politik.⁹

Tipologi pemikiran ini terlihat di berbagai wilayah kekuasaan Islam, Mesir, Turki, India/Pakistan. Adapun beberapa wilayah seperti Tunisia, Marokko, Al-Jazair tampaknya mengacu ke wawasan di atas, dan Asia Tenggara khususnya Indonesia tampak lebih beragam dalam menanggapi perkembangan politik dunia Islam. Tipologi pemikiran politik pertama terwakili oleh beberapa pemikir seperti Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, Abu A'la Al-Maududi serta Sayyid Qutb. Karakteristik dari tipologi ini merujuk kepada pemikiran-pemikiran klasik. Sedangkan, pola pemerintahan yang dianjurkan adalah tipe pemerintahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW (negara kota Madinah), dan juga pola

2011), hlm. 12.

⁹*Ibid.* hlm. 22.

pemerintahan pada masa *Khulafaurrasyidin*. Mereka tidak menghendaki umat Islam meniru pada pola pemeritahan yang dipakai oleh Barat.

a. Muhammad Rasyid Ridha

Rasyid Ridha memperkenalkan gagasan tentang "negara Islam" (*al-hukumat al-islamiyyah*). Gagasan ini sebagai sebuah alternatif bagi kkhilafah yang telah berakhir dengan keruntuhan kekhalifahan Usmani dan lahirnya repiblik sekuler Turki. Rasyid Ridha, sebagai seorang yang berkecenderungan tradisional begitu percaya dengan lembaga kesultanan Usmani yang menurutnya adalah juga kekhalifahan, walaupun mereka bukan dari keturunan Quraisy dan Arab.

Dalam konsep negara Islam Syari'ah memainkan peran penting dan otoritas untuk menafsirkan hanya pada wilayah *ablu halli wal 'aqd*, sebagai lembaga pemilih khalifah. Rasyid Ridha membedakan Syari'ah kedalam dua wilayah: wilayah *ibadab* dan wilayah *muamalah* (hubungan sosial dan duniawi). Didalam pengambilan keputusan, ulama memiliki posisi penting. Ulama sebagai wakil alamiyah dan asli dari Umat Islam. Para ulama memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin nasional (*Khilafah*)¹⁰

Meskipun pandangan-pandangan Rasyid Ridha sulit diterima untuk konteks kekinian, namun Rasyid Ridha telah berhasil memformulasikan tradisi dan merancangkan gagasan dasar bagi para penganjur negara Islam berikutnya. Ia merupakan penghubung yang penting antara teori klasik tentang kekhalifahan dengan gagasan mengenai negara Islam pada abad ke-20 yang dikembangkan oleh Sayyid Qutb dan al-Maududi

b. Sayyid Qutb dan al-Maududi

Seperti halnya Rasyid Ridha, Sayyid Qutb menginginkan bentuk pemerintahan supra nasional (kesatuan seluruh dunia Islam) yang sentralistis, tetapi daerah tidak sebagai jajahan, mempersamakan pemeluk agama, dan didirikan atas tiga prinsip: keadilan penguasa, ketaatan rakyat karena hasil pilihannya dan permusyawarahan antara penguasa dan rakyat. Meskipun ia tidak mempersoalkan sistem pemerintahan apapun sesuai dengan sistem kondisi masyarakat, namun pemerintahan ini bercirikan penghormatan pada superemasi hukum Islam (syari'ah).

Ada tiga buah dasar keyakinan yang ada di dalam diri Maududi mengenai Kenegaraan menurut Islam.¹¹ Yaitu: *pertama*, Islam merupakan agama yang paripurna, lengkap dengan cara dan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik sehingga umat Islam

¹⁰ *Ibid.* hlm. 58.

¹¹ *Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis (Magelang: Indonesiantara, 2001), hlm. 78.*

tidaklah perlu atau bahkan dilarang untuk menggunakan sistem politik dari barat, cukup dengan kembali kepada sistem Islam dengan merujuk kepada pola semasa *Khulafaurrasyidin* sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam. *Kedua*, mengenai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, adalah hanya kepada Allah, maka rakyat hanya sebagai pelaksana-pelaksana perintah Allah dimuka bumi. Baik negara ataupun juga rakyat dituntut agar menjalani hukum-hukum sebagaimana yang tercantum baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah. *Ketiga*, sistem politik Islam merupakan suatu sistem yang universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi bahasa dan kebangsaan.

Sayyid Qutb dan juga al-Maududi adalah orang pertama yang menggunakan pengertian bahwa umat manusia adalah khalifah Allah di muka bumi sebagai dasar teori kenegaraan. Keduanya menolak prinsip kedaulatan rakyat dalam pengertian konsep politik barat. Karena manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan yang sebab itu, manusia tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Konsep politik Islam ini oleh al-Maududi disebut sebagai Teo-Demokrasi. Pemikiran Al-Maududi tentang politik Islam diantaranya:

- 1) Islam adalah agama yang sempurna, lengkap dengan semua petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dalam arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik.
- 2) Kekuasaan tertinggi adalah pada Allah SWT, umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi. Tidak dibenarkan adanya gagasan kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagaimana pelaksana kedaulatan Allah, umat manusia atau negara harus tunduk pada hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 3) Sistem politik Islam adalah suatu sistem politik universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa, dan kebangsaan.¹² Pemikiran pembaruan politik al-Maududi tentang teori politik pemerintahan didasari oleh tiga prinsip. yaitu *tauhid*, *risalah* dan *khilafah*. Aspek politik Islam akan sulit dipahami tanpa memahami secara keseluruhan akan ketiga prinsip ini. *Tauhid* berarti hanya Tuhan sendirilah pencipta, penguasa dan pemelihara. Karena Tuhan adalah penguasa, segala kedaulatan di alam ini berada pada Tuhan. Dengan demikian, segala perintah dan larangan-Nya adalah undang-undang sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya

¹² Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Edisi 6 (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 166.

memiliki kedaulatan.

Risalah menurut Maududi adalah bahwa undang-undang dari Tuhan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Perbuatan Rasulullah dengan melakukan interpretasi terhadap undang-undang itu melalui perkataan dan perbuatannya disebut sunah. Inilah yang disebut sebagai *Risalah Muhammad*, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi manusia yang disebut syari'ah.

Khilafah, ia jelaskan dengan ungkapannya bahwa manusia di muka bumi ini diberi kedudukan sebagai Khalifah (perwakilan), yang berarti bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia yang dimaksudkannya adalah seluruh komunitas yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip bahwa pemegang kepemimpinan dan yang berkuasa di alam ini adalah Tuhan, kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan. Dengan demikian, setiap manusia yang menerima prinsip ini berarti telah menduduki posisi khilafah. Akan tetapi, manusia yang disertai khilafah yang sah dan benar ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu, melainkan komunitas yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip yang telah disebutkan dan bersedia menegakkan kekuasaannya atas dasar prinsip tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan khilafah itu haruslah kolektif, dan Maududi menyebut teori khilafahnya yang demikian dengan nama khilafah kolektif. Dalam ayat Al-Qur'an ada sejumlah ayat yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah: (surat An-naml: 62, Surat Al-An'am 165).

2. Pemikiran Politik Islam Sekuler

Menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara dan harus dipisahkan dengan negara. Terbentuknya negara dalam masa awal Islam hanya faktor alamiah dan historis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak perlu mendirikan negara Islam. Pemikir yang masuk dalam tipologi ini adalah Ali Abd Al-Raziq, Thaha Husein, dan Kemal Attaturk.¹³

Thaha Husein hidup pada tahun 1889 sampai 1973 merupakan rekan dekat Lutfi Sayyid. Dia adalah salah satu tokoh nasionalisme Mesir yang berorientasi pada Eropa. Gagasan-gagasannya tentang politik Islam diantaranya:

¹³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2008), hlm. 40-41.

- a. Kejayaan dan kemakmuran Islam dapat terwujud kembali apabila dengan perubahan-perubahan total yang bernafaskan liberal dan sekuler yang berkiblat ke Barat.
- b. Pada awalnya, Islam dan negara selalu terpisah. Secara Universal sistem agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah dan konstitusi negara didasarkan atas landasan-landasan praktis.

Pada bulan Maret 1924, Kemal Attaruk, Kepala Negara Turki mengumumkan dihapuskannya jabatan khilafah dari negaranya. Dia mengklaim lembaga khalifah terbukti tidak bisa berfungsi sejak awal. Tiga belas setelah kejadian penghapusan khalifah ini, tepatnya April 1925, Ali Abd Ar-Raziq, seorang hakim Syariah menerbitkan sebuah buku kontroversial yang menuntut dihapuskannya kekhilafahan dan mengingkari eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. Judul buku tersebut adalah *al-Islam wa Ushul al- Hukm*. Isi utama dari buku ini adalah penolakan terhadap sistem khilafah.¹⁴

Ar-Raziq tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khilafah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. tidak ada satupun ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memiliki khilafah.¹⁵ Lebih lanjut, tidak ada penunjukkan yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun As- Sunnah mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun umat Islam. Ar- Raziq lebih lanjut berargumen bahwa kata-kata seperti *ulil amri* dalam al- Qur'an An-Nisa ayat 59 yang diklaim oleh banyak pemikir sebagai kekhilafahan atau imamah, tidak ada sangkut pautnya dengan institusi ini dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan kekuasaan kekhilafahan.

Makna ayat tersebut menurut Ar-Raziq adalah keharusan bagi umat Islam untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Makna inilah yang menurutnya lebih luas yang dapat diperoleh dari ayat tersebut dari pemaknaan khilafah yang sama sekali tidak ada relevansinya. Ia juga membantah bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanyalah Rasulullah bukan raja atau pemimpin politik. Di

¹⁴ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010), hlm. 115.

¹⁵ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Edisi 6 (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 140-141.

sinilah Ar-Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik.

3. Tipologi Pemikiran Politik Islam Moderat

Tipologi yang ketiga ini berbeda dengan kedua tipologi sebelumnya. Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada

sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bernegara, yang untuk pelaksanaannya Umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Yang termasuk tipologi ini diantaranya adalah Muhammad Husein Haikal (lahir 1888), Muhammad Abduh (1862-1905), Fazlurrahman, Mohamed Arkoun, dan di Indonesia Nurcholish Madjid.¹⁶

a. Muhammad Husein Haikal

Pokok-pokok pemikiran Husein Haikal tentang kenegaraan dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *al-bukumab al-Islamiyyah*. Secara garis besar pemikiran-pemikirannya adalah: Prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan yang di berikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada yang berkaitan langsung dengan ketatanegaraan. Menurutnya, kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai setelah nabi berhijrah dan menetap di Madinah.¹⁷

Di dalam Islam tidak terdapat satu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga di muka hukum, pengelolaan negara didasarkan pada prinsip musyawarah, dengan berpedoman pada tata nilai moral dan etika yang telah diajarkan Islam. Dengan kata lain, sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan berasaskan pada prinsip bahwa pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaannya harus persetujuan rakyat. Rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban.

b. Muhammad Abduh

Dalam pandangan Abduh, Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika bentuk khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai

¹⁶ Syukron Kamil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003

¹⁷ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Edisi 6 (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 182 - 183.

model pemerintahan maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa apa pun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian adalah konsekuensi dari konsep teologisnya tentang kehendak bebas manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tentang sumber kekuasaan, Abduh menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah. Karenanya rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka. Jelasnya menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam arti: (1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat agama atau dari Tuhan; (2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; (3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.

Abduh tidak sependapat dengan pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu merupakan mandat dari Allah, dan karenanya ia bertanggung jawab kepada Allah pula. Menurut Abduh, seorang khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan.

Abduh mengakui bahwa bahwa Islam itu bukan agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama muslim dan sesama hidup, yang untuk pelaksanaan dan pengawasan berlakunya memerlukan adanya penguasa lengkap dengan aparatnya. Menurutnya, tugas itu merupakan tanggung jawab kepala negara beserta perangkat pemerintahnya. Tetapi kepala negara diangkat oleh rakyat dan bertanggung jawab kepadanya. Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dan berhak menurunkan kepala negara dari pemerintahannya. Kepala negara bukanlah wakil atau bayangan Tuhan di bumi, yang mewajibkan tiap muslim taat kepadanya demi agama meskipun perilaku dan kebijaksanaannya bertolak belakang dengan ajaran agama.

Dalam hal ketaatan, rakyat tidak boleh menaati pemimpin yang berbuat maksiat. Apabila pemimpin melakukan hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, rakyat harus menggantinya dengan orang lain, selama dalam proses penggantian itu tidak menimbulkan

bahaya yang lebih besar daripada masalah yang ingin dicapai.

Dengan kekuasaan politik, Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak dan wewenang pemerintah. Tapi Islam tidak memberi peluang akan munculnya sistem teokrasi. Usaha pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Undang-undang yang adil dan bebas bukanlah didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik negara lain. Kata Abduh, harus ada hubungan yang erat antara undang-undang dan kondisi negara setempat.

c. Fazlurrahman, Muhammad Arkoun, dan Nurcholis Madjid

Fazlur Rahman, Mohamed Arkoun, dan di Indonesia Nurcholis Madjid menyebut bahwa dari prinsip-prinsip yang disebut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam adalah sistem politik demokratis. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang egaliter dan terbuka atau inklusif, saling berbuat baik dan kerjasama, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender atau kulit.

Fazlur Rahman menjelaskan konsep *syura* (musyawarah). bukan berarti bahwa seseorang meminta nasehat kepada orang lain, seperti yang terjadi dahulu antara khalifah dan *ahlu balli wal 'aqd*, tetapi nasehat timbal balik melalui diskusi bersama. Konsep demokrasi yang dipilih Fazlur Rahman lebih berorientasi pada etika dan nilai spiritual Islam, tidak semata-mata bersifat material seperti di Barat. ia mengkritik para tokoh Islam yang menentang demokrasi, seperti al- Maududi.

Sebagaimana Fazlur Rahman, Arkoun juga berpendapat sama. Pertama-tama ia menjelaskan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Wewenang menurutnya bersifat mistis-teologis seperti ketika Nabi di Mekah dan kekuasaan bersifat rasional seperti ketika Nabi di Madinah yang selalu dikelilingi dewan yang beranggotakan paling tidak 10 orang. Selanjutnya, Arkoun menerima pernyataan Ibnu Khaldun bahwa sistem kekhalifahan tidak berbeda dengan sistem kerajaan yang dominatif dan hegemonik yang telah melakukan tindakan sakralisasi terhadap yang duniawi seperti terlihat pada terminologi wakil Allah di muka bumi. Dari sini kemudian ia lebih menyetujui negara demokratis, mengkritik para ulama yang telah ikut melestarikan status quo kekuasaan dinasti yang jauh dari moral Islam, dan mengecam pelaksanaan konsep *dzimmi* (yang terlindung) bagi masyarakat non Muslim.

Sebagai pemikir modern, Arkoun di satu sisi mengkritik sekularisasi gaya Atatürk di Turki tetapi di pihak lain ia juga menolak pembentukan negara Islam ala Khomeini karena telah melakukan sakralisasi terhadap sesuatu yang sebenarnya duniawi. Adapun prinsip kenegaraan dalam Islam

adalah syura, ijtihad, dan penerapan syari'at yang tujuannya, bagi Arkoun, untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan bermartabat, sehingga anggota masyarakat muslim diridhai Allah dalam menjalankan tugas pribadi dan sosialnya secara harmonis.

C. Dewan Mufti di Rusia

1. Sejarah Berdirinya Dewan Mufti Rusia

Negara Rusia baru menganut paham demokrasi dimana suara rakyat sangat menentukan terhadap keterwakilannya ditingkat parlemen dan berjalannya pemerintahan. Rusia memang tidak mau mencampuri/mengurus persolan agama akan tetapi aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh warganya tidak dilarang. Hal ini, sesuai dengan apa yang termaktub dalam konstitusi Rusia. Umat Islam dibebaskan memilih aliran kepercayaan yang diinginkan, memilih madzhab yang diinginkan, dan menyebarkannya kepada orang lain. Jadi, Wakil yang ada di parlemen tidak secara langsung mewakili golongan agama.

Negara Rusia memiliki keanekaragaman budaya, etnis, dan kelompok. oleh karena itu, konsep negara sekuler yang diambil oleh Pemerintahan Rusia baru dianggap cocok untuk diterapkan pada masyarakat yang multikultural dan multidimensi.¹⁸ Menurut UU yang berlaku di Rusia, semua agama mendapatkan perlakuan yang sama dengan posisi yang sejajar. Akan tetapi, didalam praktiknya terdapat hierarki berdasarkan jumlah penduduknya, Ortodoksi diperingkat pertama, Islam kedua, Budha ketiga, dan Yahudi keempat.

Setelah Umat Islam mendapatkan peran dalam perpolitikan dan diakuinya kebebasan beragama, maka dimulailah bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memajukan Umat Islam Rusia. Diantaranya adalah membentuk Organisasi Islam yang bertujuan untuk menyatukan Umat Islam yang terdiri dari berbagai macam komunitas. Pasca runtuhnya Uni Soviet, terdapat organisasi Muslim besar yaitu, Dewan Mufti Rusia / Russian Moufti Council.

Bersamaan dengan era keterbukaan, Umat Islam yang tersebar di seluruh negeri mulai menyadari pentingnya sebuah organisasi dewan agama disemua daerah. Diharapkan dengan dibentuknya dewan agama ini kebutuhan agama yang sangat kompleks bisa dipenuhi. Latar belakang inilah yang menjadikan embrio lahirnya Russia Mufties Council (RMC) atau dewan Mufti-Mufti Rusia. Inilah salah satu organisasi yang sangat

¹⁸ Ali Vyacheslav Polosin, "Secular State and Islamic Tradition In Russia". <http://islamdag.info/story/1068> akses 6 Agustus 2012.

berpengaruh di Rusia.

Dewan Mufti berpusat di Moskow dan membawahi organisasi - Organisasi Muslim yang ada di Rusia. Didirikan pada tahun 1996 berdasarkan keputusan bersama Majelis Agama di Rusia. Organisasi ini juga merupakan suatu asosiasi secara sukarela dari orang-orang Islam dan jenis organisasi lain dari asosiasi Muslim keagamaan di wilayah Federasi Rusia. Dewan Mufti Rusia memiliki beberapa tugas penting menyangkut kehidupan kesejahteraan sosial Umat Islam.

Tujuan utama dari Organisasi ini ialah:

- 1) Mengkonsolidasikan setiap organisasi keagamaan muslim yang ada di wilayah Federasi Rusia, mencari solusi dari setiap masalah yang dialami organisasi itu, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan komunitas muslim di seluruh Rusia.
- 2) Melakukan kordinasi dan memberikan bantuan yang berkaitan dengan aktifitas organisasi.
- 3) Bersama-sama menciptakan hubungan / komunikasi dengan otoritas pimpinan di tingkat federal maupun lokal, dan organisasi asing.¹⁹

Dewan Mufti Rusia dipimpin oleh seorang kepala, dibantu oleh ulama-ulama lain yang ada di Rusia. Dapat dikatakan pula, dewan ini sebagai wakil Umat Islam dalam menyalurkan aspirasi di Pemerintahan Rusia. Perlu dimaklumi bahwa Rusia adalah negara sekuler dimana agama merupakan hal yang sangat pribadi dan tidak diurus oleh pemerintah. Tugas -tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Mufti Rusia diantaranya membangun masyarakat Islam dari berbagai sisi bidang kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, Tempat Peribadatan, zakat, infaq, serta menjadi jalur untuk komunikasi dengan Pemerintah maupun organisasi di dalam dan luar negeri. Dewan Mufti Rusia merupakan Organisasi yang terbesar di Rusia, disamping itu masih ada organisasi-organisasi lain yang sekarang ada di Rusia. Sekaligus merupakan induk dari perwakilan kelompok maupun organisasi Islam di Rusia. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Organisasi ini diantaranya:

- 1) Mengkoordinasi seluruh organisasi Muslim yang ada di Rusia, ikut membantu menyediakan fasilitas-fasilitas ibadah seperti masjid. Selain itu, juga memfasilitasi setiap perayaan hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi Saw.
- 2) Dalam bidang pendidikan, ikut membantu mengembangkan sistem pendidikan Islam di Rusia. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan

¹⁹ "Rusians Mufties Council", <http://www.muslim.ru/2/cont/68/80/> akses 1 Agustus 2012.

bersama dari masyarakat Islam dan warga negara Rusia.

- 3) Dalam bidang lain, melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti donor darah untuk korban-korban di daerah konflik. Perhatian ini ditujukan kepada para korban yang benar-benar membutuhkan bantuan akibat peperangan di negeri Bekas Uni Soviet tersebut
- 4) Pada bulan Ramadhan, mengadakan kegiatan buka bersama selama Ramadhan. Untuk menampung jamaah Islam yang hadir didirikanlah tenda-tenda seperti yang telah dilakukan di kota Moskwa dan Kazan. Dalam kegiatan ini, tidak hanya Umat Islam yang hadir. Tetapi umat lain juga diperbolehkan untuk makan dan minum bersama dalam suasana bersama. Disinilah sikap toleransi Umat beragama dapat dilihat dan dirasakan di Rusia.

Selain kegiatan diatas, juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain seperti pelaksanaan olimpiade Islam, memfasilitasi pelaksanaan haji dan umrah. Berdirinya Negara Rusia baru didukung pula oleh sistem pemerintahan yang terbuka. Dalam hal ini, setiap aktifitas pemerintahan Rusia berusaha melibatkan seluruh warganya tanpa membedakan dari mana asal-usulnya. Rusia baru memang berpaham sekuler, dan tidak mau mencampuri terhadap persoalan keagamaan. Sehingga tanpa gerak dan keaktifan dari kelompok agama yang ada, maka sulit untuk berkembang menuju kemajuan. Diakuinya kebebasan beragama dalam konstitusi membuat pula Umat beragama di Rusia mendorong lebih berperannya kembali wakil-wakil dari Umat Islam khususnya untuk ikut serta membangun pemerintahan baru Rusia. Umat Islam mulai membangun cara tersendiri untuk saling menghormati.

2. Tokoh - Tokoh Berpengaruh dalam Dewan Mufti Rusia

Dewan Mufti Rusia merupakan sebuah lembaga yang anggotanya merupakan Ulama-Ulama yang ada di Rusia. Ada beberapa tokoh penting dalam Dewan Mufti Rusia, diantaranya:

a. Mufti Ravil Gaynutdin

Ravil Gaynutdin merupakan kepala Dewan Mufti Rusia. Ia lahir pada tanggal 25 Agustus 1959 di Tatarstan. Pendidikannya dimulai dari Belajar di sekolah Tatar, *Shali* hingga pendidikan menengahnya di Kazan, Tatarstan.. Pada Tahun 1979 ia madrasah "Mir Arab" di Bukhara. Pendidikan dilaluinya selama 4 tahun. Dan dalam kurun waktu 7 tahun saja ia diangkat sebagai imam dan khatib pertama Masjid Kazan bernama masjid. "Nur-Islam".

Pada tahun 1985 ia menjabat sebagai sekretaris utama Dewan

Agama Islam Uni Soviet dan Eropa Siberia di Ufa kota. Kemudian, pada tahun 1987 ia diangkat imam dan khatib Masjid Katedral Moskow dan sudah pada tahun 1988. Dan Pada tahun 1991 memilih menjadi Presiden Pusat Kebudayaan Islam Moskow dan wilayah-wilayah disekitar Moskow.

Pada tahun 1994 Ravil Gainutdin terpilih sebagai mufti di Majelis Konstitusi kesatuan agama Islam Rusia dan komunitas Eropa sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Agama Muslim Tengah - bagian Eropa. Selang dua tahun kemudian pada tahun 1996 Majelis kepala dewan Agama Muslim Rusia Mufti Ravil Gaynutdin terpilih sebagai ketua Dewan mufti Rusia.

Dalam tugasnya sebagai ketua Dewan Mufti, Ravil banyak melakukan terobosan-terobosan bagi kepentingan Umat Islam di Rusia. Diantaranya: Berusaha menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Rusia, pemeluk- pemeluk agama lain di Rusia, dan menjalin kerjasama dengan muslim di luar negeri. Mufti Ravil Gaynutdin mengikuti setiap konferensi muslim internasional yang digelar di berbagai negara di dunia. Ia sendiri sebagai wakil resmi dari negara Federasi Rusia. Konferensi muslim internasional sendiri diantaranya pernah dilaksanakan di Maroko, Arab Saudi, Mesir, Finlandia, Jerman, Italia, Amerika Serikat dll. Sebagai anggota delegasi resmi pemerintah Federasi Rusia mengambil bagian dalam negosiasi antarnegara dan pertemuan pribadi dengan para pemimpin eksekutif peserta yang mengikuti konferensi. Seperti; Iran, Pakistan, Siria, Mesir, Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Malaysia, Azerbaijan.

Mufti Ravil Gaynutdin adalah seorang dokter dan penulis karya ilmiah tentang teologi Islam, Muslim dogmatis dan hukum-hukum. Selain itu, ia sebagai profesor di perguruan tinggi Islam Moskow, akademisi dari International Academy Eurasia, Akademi ilmu pengetahuan Internasional Slavia, pendidikan, budaya dan agama.

Dalam jabatan eksekutif Pemerintah Rusia Mufti Ravil Gaynutdin ikut bergabung sebagai anggota Kamar Umum Federasi Rusia. Mufti Ravil adalah anggota Dewan Eksekutif untuk kerjasama bagian asosiasi keagamaan. Dalam berbagai pidatonya, Mufti Ravil Gaynitdin secara bertahap mempertahankan gagasan dialog peradaban pengakuan dan kerjasama persaudaraan di antara semua bangsa di Rusia.

b. Rushan Hazrat Abbyasov

Rushan Hazrat Abbyasov merupakan wakil kepala Dalam dewan Mufti Rusia. ia bersama mufti-mufti yang lain berusaha membangun peradaban Islam di Rusia. Dalam berbagai kesempatan, Abbyasov pernah berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan

toleransi Umat Beragama.

Antara Indonesia dan Rusia memiliki kesamaan yakni sebagai negara multikultural yang terdiri dari berbagai agama, suku dan ras. Oleh sebab itu, Dewan Mufti Rusia berkeinginan mengembangkan program belajar Islam di Indonesia terdiri dari Kunjungan wakil Mufti Rusia bertujuan untuk mempelajari Islam yang toleran di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, negara Rusia berkeinginan untuk menjalin kerjasama di berbagai sektor keagamaan di Indonesia khususnya untuk pengembangan agama Islam di Rusia.²⁰

Kegiatan-kegiatan lain yang ia lakukan sebagai wakil Mufti Rusia diantaranya: melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam di Rusia Seperti Hari Raya, Maulid Nabi, dan Isra' Mi'raj. Selain itu, menjalin kerjasama perbankan syariah di luar negeri, melakukan kunjungan ke berbagai negara-negara Muslim dengan tujuan memperkenalkan Islam di Rusia. Kedua tokoh diatas merupakan Tokoh penting dalam organisasi Dewan Mufti Rusia.

3. Karakteristik Dewan Mufti Rusia

Dalam membangun kehidupan politik dan agama yang saling berdampingan di Rusia, terdapat pilar-pilar yang menopangnya. Pilar pertama adalah setiap etnis grup punya agama dan tiap etnis dapat menghitung berapa pemeluknya. Jika terjadi pindah agama/murtad maka akan dianggap teroris. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis antar pemuka agama untuk tidak saling mengubah pendirian agama dari etnis tertentu. Tidak tertulis pula kesepakatan antara institusi Ortodoks dengan ulama Rusia untuk tidak saling mengganti keyakinan etnis tertentu. Secara tidak langsung etnis Tatar tidak Kristen dan sebaliknya Etnis Rusia tidak Islam. Apabila komposisi ini dirubah, maka akan menimbulkan reaksi berbahaya dan memicu tindakan terorisme.²¹

Sebagai contoh pada akhir 2009 ada seorang pendeta Vyacheslav yang ditembak mati karena dianggap telah mengkristenkan pemeluk Islam dari etnis Tatar atau Kaukasus yang secara tidak langsung telah beragama Islam. Ia dikenal dengan khotbahnya yang sangat keras dalam mengkritik Islam. Ada pula pendeta Rosa. Ia merupakan campuran dari ayah etnis Rusia dan ibunya etnis Tatar. Ia tertembak mati karena memurtadkan

<http://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=26510> akses 14 Oktober 2012.

²¹ Aji Surya, Frassminggi Kamasa, *Geliat Islam di Rusia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012) hlm. 79 - 84.

orang Islam. Sementara pemimpin Pusat Kebudayaan Islam Rusia Metin Mekhtiyef dibunuh karena alasan rasial. Beberapa contoh inilah yang bisa dianggap sebagai tindakan teroris karena telah berusaha mengajak seseorang dari etnis lain untuk keluar dari agama yang telah diyakininya.

Islam di Rusia sebagai agama terbesar kedua di Rusia mempunyai pola yang berbeda dengan Ortodoksi. Islam tidak mengenal Patriarki dan sentralisasi kekuasaan agama. Hal ini yang membuat Pemerintah Rusia mengalami kesulitan dalam mengontrol Umat Islam meskipun sudah diatur oleh Departemen Spiritual yang dibentuk sejak abad ke-18 dimasa pemerintahan Tsarina Catherine Agung, Islam yang diatur seperti agama Ortodoksi mendapatkan pertentangan yang keras dari pemeluknya. Akan tetapi, mereka masih bernaung didalam grup yang dipimpin oleh tokohnya. Sebaliknya, jika Umat Islam diluar kelompok ini akan dianggap sekte oleh pemerintah.

Grup besar itulah yang saat ini bernama Dewan Mufti Rusia. Ravil Gaynutdin sebagai Pemimpin tertinggi di Rusia menekankan kepada ajaran Islam murni yang berdasarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia menentang tradisi - tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, minta air suci dan percaya pada sungai suci, dan sebagainya. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman akan Islam dibentuklah dewan Majelis Ulama yang bertujuan mendidik ulama untuk berdakwah dalam masyarakat.

Ravil Gaynutdin menentang dari setiap dakwah yang dilakukan kelompok wahabi. Menurutnya, dakwah Islam yang dilakukan oleh kaum Wahabi sebagai ancaman dalam kerukunan umat beragama di Rusia. Menurut pandangan resmi Pemerintah Rusia, bahwa dakwah wahabi dianggap telah memurtadkan orang Rusia (Slavia) Kristen menjadi Islam. Ortodoksi dan Islam mengutuk aksi Wahabi dan dianggap musuh bersama di Rusia. Paham wahabi dianggap sebagai penyimpangan Islam dan bukan Islam sesungguhnya. Meskipun dilarang, tetapi apabila ada orang yang ingin mempelajari paham Wahabi di Luar Negeri tidak dilarang oleh Pemerintah Rusia tetapi tidak diperbolehkan untuk diajarkan di dalam Negeri Rusia.

Walaupun secara konstitusi tertulis bahwa agama dipisahkan dari negara atau negara tidak mecampuri urusan agama tetapi kenyataan dilapangan sangat berbeda. Patriarki sebagai pemimpin tinggi Gereja Ortodoks merupakan jabatan negara (pejabat tinggi resmi negara) yang memiliki hak keistimewaan seperti mendapatkan keamanan, mobil dinas, dan mendapatkan asuransi. Sementara, Mufti, Biksu tidak mendapatkan layaknya pemimpin tinggi gereja Ortodoks. Disisi lain pemerintah Rusia

menyadari sepenuhnya bahwa, agama dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Sebagaimana dapat diamati ketika, Presiden Rusia terpilih mendapatkan pemberkatan dari gereja walaupun hal ini merupakan bukan suatu keharusan. Sedangkan, selama proses pemilihan berlangsung praktis agama tidak memainkan peran yang signifikan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara tertulis agama terpisah dari Negara, akan tetapi secara empiris tidak ada pemisahan agama dengan negara di Rusia.

Dewan Mufti Rusia memiliki tiga dasar aturan didalam melakukan aktivitas keorganisasian, yaitu bersumber pada aturan al-Qur'an dan hukum Islam - Syariah yang disesuaikan dengan Konstitusi Federasi Rusia dan undang-undang Federasi Rusia.²²

4. Lembaga-Lembaga di Bawah Dewan Mufti Rusia

Dewan Mufti Rusia memiliki lembaga-lembaga penting yang memiliki tujuan untuk memajukan Islam di Rusia. Umat Islam menyadari bahwa runtuhnya Uni Soviet menimbulkan kesulitan ekonomi disegala sisi. Maka untuk memudahkan kegiatan-kegiatan Islam dijalinlah kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam di Luar Negeri. Organisasi Islam Internasional dan Liga-Liga Arab (terutama Arab Saudi dan Kuwait), Iran dan Turki secara sukarela memberikan bantuan finansial maupun materi bagi Umat Islam Rusia.

Peran Umat Islam tereflesikan oleh Dewan Mufti Rusia sebagai induk organisasi Islam Rusia. Hingga saat ini, Dewan Mufti Rusia memiliki tiga departemen yang bertugas mengurus kepentingan umat Islam baik dalam maupun luar negeri. Departemen tersebut ialah:

a) Departemen Urusan Internasional

Departemen Internasional memiliki tiga bidang yakni bidang pendidikan, bidang urusan haji dan umrah, dan bidang hubungan internasional. Tujuan dari bidang hubungan unternasional ini adalah untuk mempermudah aktivitas muslim rusia yang ada di luar negeri. Selain itu juga untuk mempromosikan Islam dan nilai-nilai Islam yang ada di Rusia maupun di Dunia. Dalam mempermudah aktivitasnya, organisasi ini menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga asing diantaranya: Organisasi Konferensi Islam (OKI), Bank Pembangunan Islam (IDB), Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM), Asosiasi Musli Cina, Wakuf dan Departemen Agama Kuwait, Masyarakat Muslim-Tatar (Finlandia), Dewan Imam Eropa (Austria), dan Lain-lain. Untuk saat ini lembaga ini

²² "Rusians Mufties Council", <http://www.muslim.ru/2/cont/68/80/> akses 1 Agustus 2012.

dikepalai oleh Madina Kalimullina.

Dalam bidang urusan haji dan umrah, tugas-tugas yang dilaksanakan diantaranya: Melakukan pelatihan dan bimbingan haji, semakin meningkatnya jumlah organisasi Muslim Rusia juga semakin meningkat pula animo Umat Islam Rusia untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan hingga saat ini jumlah yang diberangkatkan telah melebihi kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Dalam tahun 2007 misalnya, terdapat 26.500 dan di tahun 2010 sudah melonjak diatas angka 30.000 atau melebihi kuota yang disediakan. Khusus mengenai haji ini, Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan KBRI Moskwa untuk memberikan kursus singkat tentang manajemen haji di kota Moskwa dan Kazan. Hal-hal yang ingin diajarkan terkait dengan persiapan (pembayaran, pendaftaran, manasik, booking penginapan dan penerbangan), keberangkatan dari berbagai

daerah (penginapan hingga penerbangan), pelaksanaan di tanah suci serta pengembalian jamaah hingga kampung halaman. Pusat pelatihan dilaksanakan di tiga kota yakni, Moskwa, Dagestan, dan Kazan. Kesemuanya ini penting dilakukan mengingat Umat Muslim yang tersebar di beberapa wilayah di Rusia, sedangkan luas wilayah Rusia melebihi luas wilayah Indonesia.

b) Departemen Kesejahteraan, Kegiatan Spiritual, dan Pendidikan

Dewan Mufti Rusia beranggapan bahwa Pendidikan merupakan sumber utama untuk pengembangan masa depan Umat Islam yang nantinya dapat ikut menentukan peran di kehidupan bernegara dan kehidupan di dunia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2006 dan memiliki tugas menyediakan para pelajar Muslim yang mampu menguasai bidang ilmu pendidikan baik agama maupun sekuler untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dewan Mufti beranggapan bahwa pendidikan di luar negeri dapat dijadikan arus untuk mendidik pemuda-pemuda Rusia. Program-program yang ditawarkan dalam lembaga luar negeri ini diantaranya: Program Bahasa Asing jangka pendek (Bahasa Arab dan Inggris), Studi Sarjana untuk bidang ilmu agama Islam maupun umum, studi Master dalam bidang Ilmu agama Islam dan Umum. Setiap tahun banyak mahasiswa Muslim Rusia yang menuntut ilmu di beberapa Universitas terkemuka di dunia. Diantaranya: Universitas Al-Azhar, Universitas Islam Internasional Malaysia, dan pada akhir -akhir tahun ini banyak yang menimba ilmu di Indonesia. Beberapa negara telah menjalin kerja sama dengan lembaga Pendidikan ini, diantaranya: Arab Saudi, Qatar, Malaysia, Mesir, Indonesia, dll.

c) Departemen Urusan Ekonomi

IN RIGHT

Semangat bangkitnya Islam di Rusia tidak hanya pada aktifitas dalam pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan, bidang ekonomi juga masuk pada tahap kebangkitan. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan semangat untuk mendirikan lembaga perbankan syariah. Dengan didirikannya lembaga ini diharapkan dapat mempercepat realisasi dan pengembangan proyek-proyek investasi. Sebagai usaha untuk mempercepat terwujudnya misi ini, Dewan Mufti Rusia telah beberapa kali mengadakan seminar maupun konferensi Ekonomi Islam. Seperti: Konferensi Keuangan Islam Prospek dan Pengembangannya di Rusia pada Desember 2009.²³ Dan konferensi internasional "Pengembangan Keuangan Islam di CIS"²⁴ Disamping ketiga lembaga diatas, Dewan Mufti Rusia juga memiliki Lembaga-lembaga lain, seperti Pusat Kajian Bahasa Asing dan Lembaga Penerbitan. Dewan Mufti Rusia merupakan Lembaga yang paling berpengaruh di Rusia. Melalui lembaga ini, semua kebutuhan keagamaan yang kompleks dapat terpenuhi. Pusat-pusat pendidikan hingga perguruan tinggi secara perlahan mulai dibangun dan berkembang. Sebelumnya pada masa Soviet, tidak ada lembaga pendidikan di Rusia, akan tetapi setelah Soviet runtuh mulai didirikan kembali tempat-tempat pendidikan dan perguruan tinggi Islam yang berada di sekitar Kaukasus Utara, Volga Ural dan Wilayah Rusia Lainnya. Perguruan tinggi Islam yang didirikan diantaranya:

1) Universitas Islam Al-Fatih

Perguruan tinggi ini didirikan pada awal tahun 1995 di Kota Kazan, Tatarstan. Didirikannya Universitas Islam ini tidak lepas dari dukungan Ulama-Ulama Tatar dan Dewan Muslim Tatarstan yang secara mandiri kemudian berhasil membangun menjadi sebuah gedung pendidikan. Pada awal berdirinya Universitas ini memiliki Fakultas, yakni: Theologi Islam, Ekonomi dan Keuangan, Kesehatan, Hukum dan Teknologi. Selain itu, memiliki bidang kegiatan ekstra lain diantaranya: Islam dan Science, Ekonomi Islam, Filsafat, Al-Qur'an dan Hadis.

2) Universitas Terbuka Kebudayaan Islam

Universitas ini pertama kali dibuka pada tanggal 12 Januari 1995 di Moskow, Rusia. Secara Finansial, Universitas ini didukung oleh Kuwait. Program studi yang diajarkan mencakup mengikuti mata pelajaran: Al-

²³ Resolution of the International Conference "Islamic Finance: Prospects of Development in Russia" <http://www.muslim.ru/2/cont/68/106/1959.htm> akses 14 Oktober 2012.

²⁴ International conference "Development of Islamic Finance in the CIS" <http://www.muslim.ru/2/cont/68/106/1997.htm> akses 14 Oktober 2012.

Quran, Hadis, bahasa Arab, Sejarah Nabi, Jazirah Arab sebagai tempat lahir nabi, syariah dan cara hidup Muslim, Islam dalam sejarah, budaya Rusia dan mata pelajaran lainnya.

3) Madrasah di Karachaevo-Cherkessia

Madrasah ini telah berfungsi sejak tahun 1991 di desa Uchkeken di MaloKarachayevo. Bahkan sebelum madrasah dibuka, sebuah dewan imam telah terbentuk di Uchkeken, yang dikoordinasikan delapan komunitas Muslim. Abu Yusuf Efendi Ebzayev terpilih pemimpin dewan: Pada awal 1990 ia mulai mengajar aktif tentang Islam dan menyerukan pengamatan hukum syariah. Semangat orang-orang Rusia pada masa tersebut yang ingin belajar begitu besar. Anak-anak hingga orang tua sangat tertarik ingin belajar tentang Islam. Krisis terjadi ketika pemerintah Soviet melarang segala macam aktivitas pendidikan. Pada perkembangan selanjutnya Lebih dari 7000 orang menandatangani surat ditujukan kepada Pemerintah Soviet yang isinya menuntut bahwa kegiatan Belajar harus tetap dijalankan. Dewan imam akhirnya mengirim surat ke Pemerintah Soviet Agung Federasi Rusia. Akhirnya izin diberikan untuk dibukanya kembali madrasah tersebut. Setelah dibuka kembali kegiatan perkuliahan diberikan secara teratur, fakultas-fakultas didirikan, dan perkembangan selanjutnya terdapat madrasah khusus Perempuan di Kaukasus Utara.

5. Program dan Kegiatan Dewan Mufti Rusia

Berdirinya negara Rusia memang membawa dampak pula hal-hal yang baru. Perubahan terpenting pasca Uni Soviet runtuh adalah adanya Pengakuan hak dan kebebasan manusia. Hal ini menjadi titik balik dari kehidupan Umat Islam ketika masa Uni Soviet berkuasa dimana seluruh aktivitas keagamaan di larang oleh pemerintah. Berdirinya Negara Rusia Baru berusaha membuka kebebasan beragama bagi rakyatnya. Lebih dari 70 aliran keagamaan dan aliran kepercayaan tumbuh dalam masyarakat Rusia, dimana kebebasan beragama telah dijamin dalam konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari konstitusi Rusia tahun 1993:

Everyone shall be guaranteed the right to freedom of conscience, to freedom of religious worship, including the right to profess, individually or jointly with others, any religion, or to profess no religion, to freely choose, possess and disseminate religious or other beliefs, and to act in conformity with them.²⁵

Pasal ini membuktikan bahwa negara Rusia baru benar-benar menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Kebebasan beragama disini dimaksudkan bahwa setiap warga negara secara individu

²⁵ Konstitusi Rusia 12 Desember 1993 Pasal 28

atau bersama-sama berhak untuk memilih, memiliki dan menyebarkan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan adanya kebebasan beragama, maka bagi umat Islam maupun umat-umat lain, yang selama kurang lebih 70 tahun dilarang oleh rezim Uni Soviet, dapat hidup kembali. Bagi Umat Islam, aturan ini membawa dampak untuk lebih menyemarakkan kehidupan peribadatan yang selama sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi menjadi terbuka. Setelah Umat Islam mendapatkan peran dalam perpolitikan dan diakuinya kebebasan beragama, maka dimulailah bentuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memajukan Umat Islam Rusia. Faktor-faktor itulah yang pada akhirnya menyebabkan Umat Islam dapat melaksanakan aktifitasnya kembali.

Lahirnya Dewan Mufti Rusia sebagai embrio Umat Islam di Rusia memiliki misi penting untuk kemajuan Umat Islam, diantaranya: membangun masyarakat Islam dari banyak sisi kehidupan sosial seperti pendidikan, kesehatan, peribadahan, zakat, infaq, serta menjadi jalur untuk komunikasi dengan Pemerintah maupun organisasi di dalam dan luar negeri. Dalam akta pendiriannya, Dewan Mufti Rusia didirikan untuk mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan dan aneka kebutuhan yang terkait dengan seluruh muslim di Rusia. Program Dewan Mufti Rusia dapat dikelompokkan kedalam beberapa bidang diantaranya:

1. Bidang Sosial Keagamaan

Dewan Mufti Rusia merupakan gabungan organisasi keagamaan yang ada di seantero negeri Rusia. Tugasnya mengoordinasi kegiatannya dalam konsep kesukarelaan, diantaranya dalam penyediaan fasilitas ibadah dalam bentuk masjid. Selain itu, mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti peringatan maulid Nabi, dan lain-lainnya. Rusia merupakan negara sekuler dimana agama merupakan urusan pribadi dan tidak diurus oleh pemerintah. Disinilah peran Dewan Mufti sebagai penyedia fasilitas dan sekaligus sebagai penyelenggara.

Kecenderungan dalam kehidupan beragama lebih menonjol dikalangan generasi muda. Lebih dari 60 persen dari mereka yang mengaku beragama berasal dari kalangan usia 22 - 50 tahun, dengan tingkat pendidikan 55 persen pendidikan menengah dan 32 persen pendidikan tinggi. Selain kebebasan menjalankan aktivitas spiritual keagamaan, oleh Pemerintah Rusia juga didorong dengan diperbolehkannya kegiatan dalam perpolitikan oleh kelompok-kelompok beragama. Jumlah masjid yang tercatat resmi saat ini adalah 4.750. kawasan yang paling banyak dari jumlah masjidnya ialah Dagestan dengan

jumlah 3000-an. Di Tatarstan selama 10 tahun terakhir mencapai 1.000 masjid. Sementara di Ibukota Moskwa terdapat 20 komunitas Islam dan lima masjid besar. Diperkirakan jumlah masjid seluruhnya dapat mencapai sedikitnya 7.000 masjid di Rusia.²⁶

Lembaga-serifikasi halal juga telah berdiri di Rusia yang dinamakan *NUR*. Lembaga ini didirikan untuk memberikan sertifikat halal melalui pengujian material, bumbu, produk, fasilitas produk, asal dana, transaksi, layanan jasa, dan kriterial lain. Untuk mendukung produk-produk halal di Rusia, Dewan Mufti Rusia mulai tahun 2010 dilaksanakan Halal Expo. Kegiatan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri Rusia dan Luar Negeri. Pada akhirnya, kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun sebagai agenda yang tidak bisa dilewatkan.

Kegiatan lain dalam bidang keagamaan adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Awal dilaksanakannya kegiatan ini ialah tahun 2000 kompetisi Quran membaca diadakan untuk pertama kalinya di Moskwa. Peserta yang mengikuti berasal dari madrasah dan maktab di kota Moskwa. Sejak tahun 2003 menjadi skala regional dan pada tahun 2005 kompetisi MTQ meliputi seluruh kawasan Rusia. Pada tahun 2007 kompetisi ini diselenggarakan oleh Dewan Mufti Rusia dengan tujuan untuk menarik lebih banyak peserta dari daerah dan negara lain. Dengan demikian kompetisi MTQ yang dilaksanakan oleh Rusia menjadi tingkat internasional.

2. Bidang Pendidikan

Kebangkitan Umat Islam di Rusia tidak bisa dipisahkan dari unsur pendidikan. Pada akhir tahun 1980-an, pendidikan profesional beragama Rusia di seluruh negara Uni Soviet dilaksanakan oleh Madrasah Mir-Arab di Bukhara. Secara perlahan, Umat Islam mulai mencoba untuk membangun sebuah sistem pendidikan Islam yang menjadi kebutuhan bersama. Adakalanya tempat-tempat pendidikan masih bersifat sewaan atau pinjaman dari pihak-pihak tertentu. Pendidikan Islam di Rusia dimulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Beberapa Universitas mulai didirikan, diantaranya: di Moskwa, Kazan, Makhackala, dan Grazny. Umumnya perguruan ini didirikan masih sebatas untuk menghasilkan imam- imam dan khatib-khatib di masjid-masjid dan guru-guru di sekolah-sekolah Rusia.²⁷

Pada saat ini Islam telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan

²⁶ Aji Surya, Frassminggi Kamasa, *Geliat Islam di Rusia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm 149.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 91-92.

di Rusia. Peraturan ini telah dijalankan di 20 wilayah Rusia dan mewajibkan bagi keluarga-keluarga di Rusia supaya memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk mendapat pendidikan agama sesuai dengan minatnya. Kementerian pendidikan Rusia telah menyusun suatu skala minat para rombongan belajar warganya, yakni terdiri dari 43 persen etika sekuler, 30 persen Kristen Ortodok, 18 persen menyukai agama-agama dunia, dan 9 persen berminat terhadap islam dan 1 persen meminati Budha. Karenanya di setiap sekolah di Rusia sekarang kurikulum agama-agama tersebut diwajibkan, dan harus di ajarkan.

Untuk mendukung dan memajukan pendidikan Islam di Rusia, sebagian anak-anak muda Muslim Rusia dikirim ke luar negeri untuk menggali Ilmu Pengetahuan Islam. Negara-negara yang dituju diantaranya Mesir, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, Maroko, dan lain sebagainya. Khusus di Indonesia, perguruan tinggi Islam di Rusia telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Islam di Indonesia, diantaranya: UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang.

Perkembangan terakhir dari bidang budaya ini, di Rusia telah terdapat kegiatan yang dinamakan All Russian Islamic Olympiad yang menyatukan berbagai murid muslim dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Mulai tahun 2008, setiap Bulan Ramadhan, selalu dilaksanakan perlombaan membaca kitab suci atau Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang diikuti oleh komunitas Muslim Rusia dan negara-negara asing. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan UNESCO.

3. Bidang Budaya

Dalam bidang budaya Dewan Mufti Rusia melakukan aktifitas berdasarkan kesetiakawanan sosial yang ditujukan untuk mereka yang mengalami kesulitan hidup. Contohnya: pada bulan Agustus 2008, banyak kaum muslim Rusia yang mendonorkan darahnya untuk korban konflik Gergia-Ossetia. Perhatian tersebut dicurahkan bagi para korban yang benar-benar membutuhkan bantuan akibat peperangan di negeri bekas Uni Soviet tersebut.

Muslim Rusia pernah melaksanakan festival Internasional Film Muslim yang diberi nama (The Golden Mimbar). Salah satu tujuan dari kegiatan ini ialah memberikan wadah bagi ahli-ahli sinema muslim diseluruh Dunia untuk berkumpul menunjukkan karyanya yang bernilai moral tinggi, toleransi, dan berpolitik yang benar, serta menjunjung tinggi akhlak kemanusiaan. Pada Festival ini, Indonesia pernah mengikutinya dengan membawa Film *Ayat-Ayat Cinta*.

Gerakan-gerakan nasionalis mulai memakai slogan-slogan Islam. Di Kawasan Kaukasus Utara berbagai protes bersuarakan Islam merupakan aktivitas politik yang sering terjadi. Organisasi keagamaan mulai menyuarakan aspirasinya bukan hanya kebutuhan spiritual. Dalam kehidupan antar umat beragama, terdapat fundamental yang melandasinya.

Umat Islam sudah mulai berperan dalam mengadakan proyek acara-acara Islam di Radio, Televisi dan pemakaian bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Media masa di Rusia merupakan kebutuhan pokok bagi Muslim Rusia. Perkembangan terakhir penggunaan media untuk menyebarkan aneka informasi terkait dengan Islam sudah berjalan efektif. Diantaranya: media cetak, dan berbagai portal Islam. Portal Islam yang sudah dapat di akses diantaranya *www.muslim.ru* (situs milik Dewan Mufti Rusia), *www.muslimeco.ru* (situs untuk urusan ekonomi dan bisnis), *www.muslimedu.ru*, *www.muslim-efo.ru*, *www.umma.ru*, *www.balalnur.ru*.

Tepat pada perayaan Idul Fitri 1433 H, Muslim Rusia meluncurkan saluran televisi yang diberi nama AL-RTV. Televisi ini mengudara selama 24 jam mencakup delapan kawasan di Rusia. Televisi itu didirikan oleh organisasi Muslim terbesar Rusia untuk meningkatkan nilai keagamaan dan akan mencakup enam republik Kaukasus Utara, Bashkortostan, dan Tatarstan. Televisi ini didirikan atas sumbangan /swadaya masyarakat dan Hibah Pemerintah. Sebelumnya media Islam diwakili oleh antara lain perusahaan televisi *Islamkiy Mir* (Dunia Islam), sedangkan televisi Rusia secara periodik menayangkan satu program berwarna Islam yang bernama *Musulmane* atau dalam arti lain *Muslim*. Dalam program *Musulmane* berisi pengajian, sejarah Islam, cerita sukses orang-orang Islam hingga masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di media cetak telah beredar beberapa majalah dan tabloid yang terkait dengan sisi kehidupan Islam.

D. Kiprah Dewan Mufti dalam Perpolitikan di Rusia

1. Peran Dalam Penyelesaian Konflik Chechnya - Rusia

Pada masa-masa awal berdirinya negara Rusia, dapat dikatakan muncul tiga persepsi keamanan Rusia. *Pertama*, gerakan-gerakan Separatis ditakutkan akan menghancurkan integritas Rusia. *Kedua*, konflik-konflik tradisional yang dibungkam selama Uni Soviet berkuasa muncul kembali dan dapat meluas ke wilayah Rusia. *Ketiga*, ketakutan akan kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat menyerang Rusia yang tengah goyah setelah runtuhnya Uni Soviet.

Selepas bubarnya Uni Soviet, Rusia dan Umat Islam dihadapkan pada ancaman separatis yang mendapatkan pengaruh dari gejolak kawasan

Asia Tengah dan Kaukasus. Masalah politik-agama ini pada akhirnya bermuara pada tujuan separatistis, yakni untuk mengganti elite yang berkuasa, dan mendirikan suatu wilayah republik tersendiri. Gejolak politik-agama di wilayah Rusia berkisar di Kaukasus bagian utara, yakni wilayah Chechnya dan Dagestan. Sebelumnya, Pemerintah Uni Soviet telah mencabut akar kebudayaan Chechnya dan Dagestan dengan memaksakan keseragaman Rusiafikasi, memberlakukan sekularisasi disegala lini, menekan setiap kelompok yang masih setia pada ajaran agama, dan mendeportasi hampir satu juta suku Chechen dan Ingush ke wilayah Kazakhstan karena dituduh akan berkolaborasi dengan Nazi Jerman. Dalam berbagai penelitian disebutkan sedikitnya 200.000 orang mati kedinginan, kelaparan, dan menderita berbagai penyakit selama hidup dipengasingan. Atas perintah Joseph Stalin, tentara Rusia membantai ratusan ribu orang dari kedua etnis tersebut. Perintah Stalin ini, pada akhirnya menimbulkan kemarahan penduduk Kaukasus Utara. Rakyat Dagestan bergerak melawan pemerintah Soviet dan terjadilah Perang Patriotik yang menelan banyak korban. Dalam peperangan ini, setidaknya semua keluarga di Dagestan kehilangan satu anggota keluarganya.

Memori masa lampau inilah yang tidak mudah dihapus dalam ingatan rakyat Kaukasus. Meski mereka menyatakan setia pada pemerintah Rusia, tetapi rasa saling curiga dan prasangka masih ada. Berbagai gerakan separatisme yang muncul di Rusia pasca runtuhnya Soviet terjadi karena berbagai faktor diantaranya faktor sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Selain itu, faktor kemiskinan, dan tidak meratanya kesempatan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya juga merupakan penyebab terjadinya gerakan separatisme di Rusia. Dari faktor-faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa, wilayah Chechnya dan Dagestan yang ditempati oleh Mayoritas Umat Islam memiliki peran penting dalam membangun kekuatan Rusia baru dari sisi ekonomi, kedua wilayah ini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat diperlukan bagi kemajuan negara Rusia. Rusia tentunya tidak menginginkan kedua negara ini memisahkan diri dari kedaulatan Rusia.

Rusia merupakan negara dengan keberagaman multi etnis dan agama. Keadaan ini memungkinkan terjadinya konflik sosial maupun keagamaan terjadi dalam masyarakat. Hal-hal yang masih sering terjadi di Rusia hingga kini adalah konflik berkaitan agama dan aksi-aksi terorisme. Aksi-aksi terorisme terwujud dalam aksi-aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok aliran ekstrim yang ada di Rusia. Aksi-aksi bom bunuh diri ini sasarannya adalah orang-orang Muslim yang memiliki

pengaruh dalam perpolitikan di Rusia.

Akar dari permasalahan terorisme di Rusia pada umumnya berlatar belakang sparatisme. Gerakan-gerakan sparatisme yang ada di Rusia banyak yang berasal dari wilayah-wilayah mayoritas Muslim seperti, Chechnya, Dagestan, dan Ingushetia. Diantara tiga wilayah itu, Chechnya merupakan wilayah yang dilanda konflik paling lama. Dimulai dengan gerakan untuk mendirikan negara tersendiri pada tahun 1991 hingga meletusnya perang Chechnya I pada tahun 1996, Perang Chechnya II tahun 1999, dan aksi-aksi bom bunuh diri hingga tahun 2008-an yang masih sering terjadi.

Republik Chechnya sering disebut sebagai Chechenkaya atau sering disebut dengan Chechnia atau Chechhenia, merupakan wilayah republik yang berada di Rusia. Terletak di bagian tenggara Eropa di pegunungan Kaukasus Utara. Ibu Kota Grozny. Pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, Republik Chechnya dibagi ke dalam dua wilayah, Republik Chechnya dan Republik Ingushetia. Chechen adalah etnis minoritas yang tinggal terutama di Rusia wilayah Kaukasus Utara. Setelah jatuhnya Uni Soviet, gerakan separatis Chechnya melancarkan kampanye terkoordinasi untuk memerdekakan diri dari Rusia. Akibatnya, terjadilah perangan antara Chechnya dan Rusia.

Pada awal 1990-an, Chechnya berkehendak memerdekakan diri pasca runtuhnya Uni Soviet yang dipelopori oleh gerakan All-Kongres Nasional. Tanggal 26 November 1990 Dewan Tinggi Chechnya-Ingushetia mendeklarasikan Kedaulatan Republik Chechnya-Ingushetia. Sebagai presiden pertama ialah Dzokhar Dudayev dari golongan Islam Sunni. Pada awal berdirinya, rakyat Chechnya-Ingushetia memaksakan diri untuk menjadi negara terpisah dengan Federasi Rusia. Akan tetapi, keinginan ini di tolak oleh Presiden Boris Yeltsin. Hal ini memiliki beberapa alasan diantaranya. Chechnya merupakan bagian dari Federasi Rusia Republik Sosialis (USSR) dan menurut konstitusi Rusia tidak ada hak untuk memisahkan diri. Pemerintah Soviet mempertimbangkan jika Republik Chechnya berpisah maka republik-republik yang lain pun akan ikut berpisah. Alasan selanjutnya adalah Pertimbangan perekonomian, Chechnya merupakan daerah penghasil minyak jika dipisahkan akan mengurangi kuota energi negara Rusia.

Dari tahun 1994 hingga 1996, terjadilah perang Chechnya pertama. Pada peperangan ini puluhan ribu warga sipil tewas, dan Rusia akhirnya memberikan kemerdekaan secara kepada wilayah Chechnya. Pada bulan Mei 1996, Presiden Rusia Boris Yeltsin menyepakati perjanjian perdamaian dengan separatis Chechnya dengan menandatangani gencatan

senjata. Akan Tapi kekerasan berkobar lagi tiga tahun kemudian.

Pada Agustus 1999, militan Chechnya menyerang republik Rusia untuk mendukung gerakan separatis lokal. Bulan berikutnya, lima bom meledak di Rusia selama sepuluh hari dan menewaskan hampir tiga ratus warga sipil. Kejadian ini mendorong Rusia untuk meluncurkan Perang Chechnya yang kemudian dikenal dengan Perang Chechnya kedua. Pada bulan Februari 2000, Rusia merebut kembali ibukota Chechnya Grozny. Pada peperangan kali ini Puluhan ribu Chechnya dan Rusia terluka dan tewas serta ratusan ribu warga sipil mengungsi. Sejak beraakhirnya perang kedua, aktivitas gerakan separatis Chechnya secara perlahan telah berkurang.

Pada Bulan Maret 2003 Chechnya melakukan referendum untuk menentukan langkah Chechnya sebagai republik yang merdeka. Hasil dari referendum ini ialah Chechnya Sebagai sebuah negara bagian dan akan bergabung ke dalam Federasi Rusia. Sebagai presiden pertama Chechnya diangkatlah Akhmad Kadyrov pada bulan Oktober 2003. Akan tetapi pada 9 Mei 2004 pada saat Rusia merayakan hari kemenangan atas Jerman di Perang Dunia II, Kadirov dan beberapa orang terdekatnya terbunuh dalam serangan bom. Hal ini menyebabkan hubungan dami yang sedang dilakukan Rusia mengalami hambatan.

Upaya secara terus menerus dilakukan oleh Rusia demi terciptanya suasana damai. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menangkap kelompok-kelompok sparatis yang masih tersisa di wilayah Checnya. Walaupun gerakan separatis mulai berkurang, aksi-aksi kekerasan diantara kedua belah pihak masih sering terjadi hingga saat ini. Sejak tahun 2008, Insiden kekerasan sebanyak 795 kasus, dan pada menjadi 1.100 kasus pada tahun 2009. Aksi dan bom bunuh sering kali terjadi yang sebagian besar terjadi di Chechnya.²⁸

Berikut beberapa aksi-aksi bom bunuh diri yang menewaskan tokoh muslim yang pernah terjadi di rusia:

- a. Pada tanggal 9 Mei 2004 bertepatan dengan hari kemerdekaan Rusia, terjadi di Grozny dengan menewaskan Akhmad Kadyrov yang mana sebagai Presiden Republik Chechnya. Meninggalnya Akhmad Kadyrov memperburuk usaha penyelesaian Damai di Republik Chechnya oleh Rusia.
- b. Pada bulan Agustus 2004 aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua

"Chechen Terrorism (Russia, Chechnen, Separatist)",
<http://www.cfr.org/terrorism/chechen-terrorism-russia-chechnya-separatist/p9181>
akses 12 Oktober 2012.

wanita yang terletak didekat kota Moskow, aksi ini menewaskan 90 Orang.

- c. Pada bulan Oktober 2005 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Separatis Chechnya di kota Nalchik wilayah Rusia bagian selatan. Akibatnya, delapan puluh lima orang tewas.
- d. Pada bulan 28 oktober 2009, enam puluh kelompok mujahid menyerang desa Tsentoroy dikawasan Chechnya. Kejadian ini menewaskan enam orang polisi dan duabelas warga sipil
- e. Pada bulan 9 September 2010 terjadi serangan bom di sebuah pasar di Vladikavkaz dan mengakibatkan 19 orang tewas dan 190 orang luka-luka.
- f. Pada 19 Oktober 2010 sekitar lima pejuang mujahid menyerang dan terjadi baku tembak di pusat kota Grozny, Chechnya. Tiga orang tewas dan melukai 17 Polisi dan warga sipil dalam aksi ini.²⁹Aksi-aksi kekerasan tersebut dengan wujud aksi-aksi bom bunuh diri tersebut mengancam persatuan muslim di Rusia. Hal ini disebabkan usaha mempersatukan umat Muslim oleh Rusia belumlah selesai.

Peran Dewan Mufti Rusia

Dewan Mufti Rusia tidak hanya bergerak dalam bidang sosial keagamaan, akan tetapi pada saat tertentu dapat masuk dalam ranah perpolitikan. Dewan Mufti sebagai organisasi tinggi Umat Islam memiliki peran yang strategis dalam upaya ikut menciptakan iklim perdamaian di Rusia. Aksi-aksi separatis yang terjadi di Chechnya merupakan salah satu diantara aksi-aksi separatis yang ada di wilayah-wilayah di Rusia. Di wilayah-wilayah Islam seperti Dagestan, Tatarstan, dan Ingushetia juga bermukim kelompok-kelompok separatis yang mengancam perdamaian yang sedang dibangun antara Rusia dengan umat Islam. Gerakan-gerakan separatis yang ada di Rusia pada umumnya merupakan pengaruh jaringan Al-Qaeda yang ada di Afghanistan. Mereka mencoba ingin mendirikan negara Islam tersendiri di wilayah mereka tinggal di kawasan Rusia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Rusia untuk memberantas kelompok separatis ini. Mulai jalan perang hingga jalan damai telah dilakukan. Dewan Mufti Rusia juga ikut berperan dalam upaya mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Chechnya dengan Rusia dan wilayah-wilayah Islam lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan Dewan Mufti di Rusia diantaranya:

²⁹ Jim Nichol, "Stability in Russia's Chechnya and Other Regions of the North Caucasus: Recent Developments", Congressional Research Service. 13 Desember 2010.

a. Mengeluarkan fatwa-fatwa perdamaian

Dalam setiap kesempatan, mufti-mufti yang ada di Rusia selalu menyerukan upaya perdamaian dalam setiap terjadinya konflik di Rusia. Fatwa perdamaian dapat berwujud nasihat, atau saran langsung kepada pemerintah atau rekomendasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Upaya-upaya damai antara Chechnya dan Rusia mulai dapat diwujudkan ketika Vladimir Putin menjabat sebagai Presiden Rusia. Putin dianggap sebagai tokoh perdamaian di Rusia walaupun terkadang dianggap memerintah dengan tangan besi. Ulama di Rusia berperan dalam mencegah aksi-aksi radikal yang mengarah kepada pemberontakan. Islam merupakan bagian integral dari bangsa Rusia dan tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya, keagamaan, dan sosial. Tradisi Islam berdasarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan keadilan yang abadi. Dalam setiap kesempatan, baik secara langsung atau tidak langsung, Dewan Mufti selalu menyerukan perdamaian.

Chechnya merupakan wilayah dengan konflik paling lama di Rusia. Hingga saat ini serangkaian aksi-aksi kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme masing sering terjadi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik ulama, masyarakat, maupun Pemerintah Chechnya - Rusia.

Selain menekankan perdamaian di Chechnya dan Rusia pada umumnya, Dewan Mufti juga berupaya mendekatkan hubungan Rusia dengan negara-negara Islam. Dengan mendekatkan diri pada dunia Islam akan membuat umat Islam Rusia memiliki peran yang penting dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, dan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi kebijakan politik luar negeri Rusia. Atas berbagai pertimbangan dari Dewan Mufti pula Presiden Putin pada awal pemerintahannya pada tahun 2003 melakukan kebijakan pro-Islam seperti mendukung pengembangan tempat ibadah dan pendidikan Islam di Rusia. Sedangkan untuk dunia internasional, mencetuskan gagasan bahwa Rusia harus ikut serta dalam kegiatan Organisasi Konferensi Negara-negara Islam (OKI), sekalipun hanya sebagai peninjau. Perlu digarisbawahi, memang tidak ada pembicaraan mengenai keanggotaan Rusia di OKI, karena memang ada kebijakan-kebijakan politik Rusia yang tidak sepenuhnya dapat sejalan dengan kebijakan-kebijakan OKI. Melalui pendekatan ini, diharapkan unsur ekstrem yang ada di Rusia dan Islam akan menghilang. Langkah-langkah ini sepenuhnya didukung oleh Dewan

Mufti di Rusia.³⁰

b. Memasukan Kurikulum Islam dalam Pendidikan di Rusia

Salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya Islam ekstrimis di Rusia ialah dengan memberikan pemahaman Islam yang benar. Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin mengeluarkan keputusan bahwa seluruh agama yang ada di Rusia akan diajarkan di sekolah. Dengan keputusan itu, wali murid harus memilih satu dari enam mata pelajaran agama yang ditetapkan. Kurikulum tersebut mencakup pelajaran agama Islam, Kristen Ortodoks, Yahudi, Budha, agama-agama dunia, dan etika sekuler. Kementerian Pendidikan Rusia merilis data minat pelajaran Agama yang diikuti para siswanya. 43 persen pelajar mengikuti pelajaran etika sekuler, 30 persen mengikuti pelajaran Kristen Ortodoks, 18 persen ke arah agama-agama dunia, 9 persen mengikuti pelajaran agama Islam, dan 1 persen mengikuti kelas Budha.³¹

Hingga kini Islamfobia juga masih berkembang di Rusia. Hal ini masih dilihat dari aksi-aksi kekerasan yang terkadang masih terjadi di Rusia. Setelah Perang Chechnya berakhir Rusia dihadapkan pada aksi-aksi teror seperti aksi bom bunuh diri dan pemboman terhadap tempat-tempat umum. Atas kejadian ini kebanyakan kalangan menuduh Umat Islam dibalik peristiwa itu walupun pemerintah Rusia mengatakan bahwa Islam tidak ada kaitan sama sekali. Anggapan keliru inilah yang terkadang masih berkembang di Rusia bahwa Islam identik dengan aksi-aksi kekerasan.

Untuk mengurangi pemahaman akan Islamophobia, Dewan Mufti Rusia sudah melakukan beberapa langkah diantaranya meluncurkan program-program pendidikan dan tayangan-tayangan Islam. Langkah ini juga diharapkan dapat terjalin kerjasama dengan media-media Rusia. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang salah dan yang benar bagi Umat Islam khususnya dan rakyat Rusia berkaitan dengan Agama Islam.

Selain berkembangnya Islamophobia, Umat Islam juga terkendala tingkat kesadaran berpolitik yang masih rendah. Pada masa soviet berkuasa Islam memang sengaja diasingkan sehingga terkadang mereka tidak berpendidikan sama sekali. Selain itu, karena berada didaerah pinggiran dan mayoritas menempati kelas mengah kebawah. Pendidikan tinggi hanya dirasakan bagi mereka yang memiliki biaya tinggi, sedangkan

³⁰ Adang Sutrisna, "Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam membangun Aliansi Peradaban Dengan Dunia Islam", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia, 2010, hlm. 95 - 97.

³¹ "Islam Masuk Kurikulum Sekolah di Rusia", <http://www.dakwatuna.com/2012/02/18645/islam-masuk-kurikulum-sekolah-di-rusia/> akses 14 Oktober 2012.

bagi yang memiliki biaya pas-pasan cukup hanya sampai tingkat dasar. Kebanyakan pendidikan Islam di Rusia juga hanya menghasilkan sarjana yang akan menjadi khotib atau imam masjid saja sehingga dalam berpolitik pemahaman mereka masih kurang.

Selain bebrapa cara diatas, tentunya masih banyak cara yang dilakukan oleh Dewan Mufti dalam mengenalkan agama Islam yang benar. Gerakan- gerakan nasionalis mulai memakai slogan-slogan Islam. Di Kawasan Kaukas Utara berbagai protes bersuarakan Islam merupakan aktivitas politik yang sering terjadi. Organisasi keagamaan mulai menyuarakan aspirasinya bukan hanya kebutuhan spiritual. Dalam kehidupan antar umat beragama, terdapat fundamental yang melandasinya.

Umat Islam sudah mulai mengadakan proyek acara-acara Islam di Radio, Televisi dan pemakaian bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Media masa di Rusia merupakan kebutuhan pokok bagi Muslim Rusia. Perkembangan terakhir penggunaan media untuk menyebarkan aneka informasi terkait dengan Islam sudah berjalan efektif. Diantaranya: media cetak, dan berbagai portal Islam. Portal Islam yang sudah dapat di akses diantaranya *www.muslim.ru* (situs milik Dewan Mufti Rusia), *www.muslimeco.ru* (situs untuk urusan ekonomi dan bisnis), *www.muslimedu.ru*, *www.muslim-efo.ru*, *www.umma.ru*, *www.balahnur.ru*.³²

Tepat pada perayaan Idul Fitri 1433 H, Muslim Rusia meluncurkan saluran televisi yang diberi nama AL-RTV. Televisi ini mengudara selama 24 jam mencakup delapan kawasan di Rusia. Televisi itu didirikan oleh organisasi Muslim terbesar Rusia untuk meningkatkan nilai keagamaan dan akan mencakup enam republik Kaukas Utara, Bashkortostan, dan Tatarstan. Televisi ini didirikan atas sumbangan /swadaya masyarakat dan Hibah Pemerintah.³³ Sebelumnya media Islam diwakili oleh antara lain perusahaan televisi *Islamkiy Mir* (Dunia Islam), sedangkan televisi Rusia secara periodik menayangkan satu program berwarna Islam yang bernama *Musulmane* atau dalam arti lain *Muslim*. Dalam program *Musulmane* berisi pengajian, sejarah Islam, cerita sukses orang-orang Islam hingga masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di media cetak telah beredar beberapa majalah dan tabloid yang terkait dengan sisi kehidupan Islam.

2. Karakteristik Pemikiran Dewan Mufti Rusia

³² *Ibid*, Hlm. 92 - 94.

³³ "Rusia Luncurkan TV Islam 24 Jam"
<http://ramadan.detik.com/read/2012/08/20/195729/1995433/631/rusia-luncurkan-tv-islam-24> jam akses 28 Agustus 2012.

a. Tipe-Tipe Pemikiran Dewan Mufti Rusia

Negara Rusia baru menganut paham demokrasi dimana suara rakyat sangat mempengaruhi dalam tingkat parlemen. Semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk berdemokrasi. Selain itu, kebebasan beragama juga telah diakui dalam konstitusi Rusia dan dengan aturan ini semakin menguatkan bahwa agama diakui oleh negara dan kegiatan keagamaan tidaklah dilarang. Walaupun agama diakui negara tetapi negara tidak mau ikut mencampuri terhadap urusan agama. Terhadap aktivitas keagamaan pemerintah Rusia selalu mendukung jika kegiatan itu untuk kebaikan umatnya.

Era keterbukaan di negara Rusia baru mengakibatkan perubahan besar-besaran dalam berbagai sisi kehidupan. Salah satu perubahan terpenting ialah kebebasan dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Umat Islam dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Era keterbukaan, era kebebasan beragama dan diakuinya agama dalam konstitusi menjadikan salah satu faktor lahirnya organisasi Islam Dewan Mufti di Rusia. Faktor lainnya adalah kebutuhan dari umat Islam sendiri yang perlu memerlukan suatu organisasi yang dapat membantu memecahkan berbagai urusan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Rusia sebagai bekas warisan Uni Soviet memiliki beraneka ragam etnis dan agama. Dalam konstitusi, ada empat agama yang diakui sebagai agama resmi Rusia, yakni Ortodoks, Islam, Budha, dan yahudi. Beraneka ragamnya agama menuntut kehidupan saling toleransi antar agama. Hal ini agar tidak terjadi konflik-konflik beralaskan agama. Agama Islam di Rusia merupakan agama asli masyarakat setempat dan sudah ada semenjak abad ke 7 M. Mayoritas Islam di Rusia berpaham sunni bermadzhab Hanafi san Syafi'i. Berbagai faktor tersebut ikut menentukan karakteristik dari organisasi Dewan Mufti di Rusia.

Dalam perkembangannya, Dewan Mufti dalam menjalankan aktivitasnya cenderung mengupayakan jalur damai dan mengutamakan sikap toleransi beragama. Dalam menyebarkan agama Islam dapat dikatakan menggunakan jalan-jalan damai dan menghindari paksaan dan kekerasan. Sesuai dengan Firman Allah:

Berdasarkan data yang ditemukan, maka dapat disimpulkan Karakteristik Pemikiran Dewan Mufti di Rusia dalam hal ini termasuk ke dalam tipe pemikiran Moderat. Dewan Mufti lebih mengutamakan nilai-nilai Islam dapat berkembang dalam setiap aspek sosial politik Rusia. Dewan Mufti menggunakan cara-cara yang halus dalam upaya mendekati diri dengan masyarakat dan pemerintah Rusia. Akibatnya, dalam masyarakat gerakan dakwah dapat diterima secara terbuka dan

dapat terjalin hubungan kerjasama sekaligus mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Rusia.

Dewan Mufti Rusia dengan sukarela memang harus ikut menjalankan fungsinya dalam upaya menjalankan dakwah Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Agama di Rusia bukanlah urusan pemerintah. Maka masing-masing pemeluk agama harus mengatur sendiri mengenai aktivitas keagamaannya. Disetiap peringatan hari-hari besar Islam Dewan Mufti memiliki andil sebagai pihak penyelenggara dan pelaksanaan kegiatan. Dalam bidang ibadah, mengharuskan diri ikut menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Umat Islam. Dalam bidang kerjasama, Kelompok Islam harus mampu meningkatkan kerjasama dengan kelompok lain, dengan pemerintah, maupun organisasi Internasional. Tugas berat inilah yang mesti dipegang oleh kelompok-kelompok Islam seperti Dewan Mufti Rusia dalam rangka menjaga eksistensi Umat Islam.

Dewan Mufti Rusia dianggap sebagai wakil daru Umat Islam di Rusia, maka peran dan upaya yang dilakukan dalam perpolitikan Rusia memiliki posisi yang penting. Dewan Mufti diperlukan sebagai jalan untuk merangkul Umat Islam demi kepentingan-kepentingan Rusia. Dari segi politik, pemerintah Rusia memerlukan kerjasama dalam memberantas gerakan separatisme yang ada di Rusia, kerjasama lainnya ialah aspirasi politik Umat Islam ari bawah dapat tersalurkan kepada Pemerintah dengan perantara Dewan Mufti Rusia. Kerjasama Rusia dengan negara-negara Islam juga dapat dilaksanakan karena faktor Islam yang ada di Rusia. Jelasnya antara Islam (dalam hal ini Dewan Mufti) tidak dapat dipisahkan dari Rusia. Bagi Rusia, menjalin kerjasama dengan Islam berarti ikut menciptakan Perdamaian.

Walaupun antar Rusia dan Islam terjalin hubungan baik, akan tetapi tidak serta merta Islam dapat berperan sepenuhnya dalam perpolitikan di Rusia. Peran Politik dalam hal ini misalnya mendirikan partai-partai yang berbasis Islam atau gerakan organisasi Islam yang memiliki tujuan politik dalam hal ini dilarang oleh pemerintah Rusia. Rusia menganut paham sekuler dan Agama bukanlah urusan dari pemerintah. Faktor inilah yang menyebabkan perjuangan Islam dalam aspek pemerintahan terhambat. Islam di Rusia lebih cepat berkembang dalam aspek sosial keagamaan.

Pembentukan identitas nasional Islam dalam masyarakat multi etnik menjadi isu yang sangat aktual hingga sekarang. Umat Islam menempatkan diri secara harmonis, meski tidak selalu mulus dalam naungan Federasi Rusia. Dampak Islam dalam pembentukan identitas nasional dan penggunaan Islam dalam mendukung integrasi nasional

semakin terlihat. Semenjak runtuhnya Uni Soviet, Agama merupakan hal yang sedang dipelajari kembali oleh masyarakat Rusia. Galsnost membuat warga Rusia mencari nilai-nilai moral dan spiritual yang tidak mereka temukan selama era komunisme.

b. Urgensi Fatwa Dewan Mufti bagi keberadaan Umat Islam di Rusia

Sebagai Organisasi Keagamaan, Dewan Mufti memiliki peran strategis dalam berbagai sisi kehidupan Umat Islam. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, Tempat Peribadatan, zakat, infaq, serta menjadi jalur untuk komunikasi dengan Pemerintah maupun organisasi di dalam dan luar negeri. Sejak pertama didirikan, Dewan Mufti lebih mengarah kepada organisasi yang bersifat sosial. Salah satu tujuannya adalah Mengkonsolidasikan setiap organisasi keagamaan muslim yang ada di wilayah Federasi Rusia, mencari solusi dari setiap masalah yang dialami organisasi itu, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan komunitas muslim di seluruh Rusia.

Dewan Mufti dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk memberikan fatwa terhadap permasalahan umat yang terjadi di Rusia. Bagi umat Islam, fatwa ulama memiliki arti penting sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas sosial dan agama agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Fatwa bagi Umat Islam memiliki manfaat diantaranya:

- 1) Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan Islam di Rusia.
- 2) Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dan dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan permasalahan umat yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang mungkin belum diantisipasi sebelumnya. Ijtima' ulama penting untuk dapat menjadi bekal para ulama dalam membimbing dan mengarahkan umat dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam di Rusia dapat dikatakan dalam tahap kebangkitan. Umat Islam mengalami masa-masa terburuk dalam sejarah ketika Pemerintahan Uni Soviet berkuasa, dimana Uni Soviet menerapkan ideologi komunisme dengan melarang setiap aktivitas keagamaan. Fasilitas-fasilitas ibadah dan masjid- masjid ditutup dijadikan gudang tempat penyimpanan barang, sekolah- sekolah keagamaan banyak yang dihancurkan. Dari jumlah

fasilitas ibadah yang sebelumnya mencapai ribuan jumlahnya hanya tinggal ratusan saja. Bagi yang mencoba melakukan peribadatan secara terbuka ditempat umum, tidak segan-segan akan dianiaya hingga dibunuh oleh pemerintah Soviet.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, aktivitas keagamaan yang terdiam pada masa Uni Soviet mulai berkembang kembali. Rusia sebagai negara baru warisan Uni Soviet mulai menerapkan konsep baru dalam bernegara. Pemimpin-pemimpin Rusia baru merubah ideologi negara Rusia, sebelumnya berpaham komunis menjadi berpaham demokrasi. Agama Islam berkembang kembali tidak bisa dilepaskan dari bangkitnya kesadaran dari masing-masing individu. Agama Islam memang seolah-olah telah musnah pada masa Uni Soviet karena tekanan dan larangan dari Pemerintah. Akan tetapi, dalam hati individu Umat Islam masih tersimpan keyakinan yang kuat akan aqidah ke-Islaman.

Secara bergotong royong orang-orang Islam mulai mendirikan kembali tempat-tempat Ibadah maupun sekolah. Masjid-masjid dibangun kembali, sekolah-sekolah dan universitas juga didirikan. Pemerintah Rusia memfasilitasi dari pembangunan tempat-tempat Ibadah maupun sekolah dengan mengharuskan mereka mendaftarkan ke Departemen Hukum agar di akui keberadaannya oleh negara. Pendidikan bagi umat Islam merupakan salah satu faktor penting dalam upaya membangun sumber daya manusia di Rusia.

Disamping umat Islam berjuang dalam tahap kebangkitan untuk mempelajari agama, juga dihadapkan pada gerakan-gerakan ekstrimis atau separatis yang juga ikut berkembang di Rusia. Hal ini tentunya menjadikan salah satu hambatan bagi umat Islam sendiri dan pemerintah Rusia dalam membangun kehidupan yang aman dan damai, saling menghormati antar pemeluk agama. Gerakan-gerakan separatis yang berkembang sebenarnya tidak sesuai dengan ideologi yang di anut oleh Rusia. Rusia menganut ideologi sekuler dengan tujuan untuk menghormati kepentingan masing-masing agama sehingga tidak terjadi diskriminasi umat. Agama merupakan urusan masing-masing individu yang diwakili oleh kelompoknya. Apabila terjadi persoalan yang berkaitan dengan agama, maka penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin kelompoknya.

Dewan Mufti menjadi penengah antara kepentingan umat Islam dan pemerintah Rusia. Dewan Mufti diharuskan dapat mengayomi dan melayani akan kepentingan umat yang sangat kompleks, disisi lain ia juga harus pandai berdiplomasi dengan pemerintah agar keinginan umat Islam dari bawah dapat tersalurkan. Dengan ideologi yang dianut oleh Rusia,

maka Dewan Mufti memiliki yang strategis dalam rangka membangun peradaban umat Islam. Pemerintah Rusia juga memerlukan peran dan kontrol Dewan Mufti terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Apakah kebijakan tersebut sesuai kepentingan umat atau melanggar kepentingan umat. Masyarakat, Dewan Mufti, dan Pemerintah memiliki hubungan yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di Rusia. Dewan Mufti berwenang memberikan Fatwa untuk kemaslahatan umat Islam sendiri dan suatu saat fatwa Dewan Mufti juga diperlukan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan demi kepentingan bersama.

E. Penutup

Dari pemaparan dan analisis tentang peran politik Dewan Mufti Di Rusia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Karakteristik pemikiran Dewan Mufti di Rusia termasuk kedalam tipe pemikiran moderat. Dewan Mufti tidak menentang ideologi sekuler yang dipilih oleh Rusia, hal ini dikarenakan Rusia terdiri dari berbagai macam kelompok, etnis, dan multi agama. Langkah ini juga untuk mencegah disintegrasi bangsa jika berpihak pada salah satu aliran yang ada di Rusia. walaupun berideologi sekuler, nilai-nilai Islam mampu berkembang dalam berbagai sisi, baik sosial maupun politik; (2) Dewan Mufti memiliki peran penting dalam membangun peradaban umat Islam dan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Rusia. fatwa Dewan Mufti sangat diperlukan untuk membantu memecahkan permasalahan Umat yang sangat kompleks. Sedangkan bagi Pemerintah Rusia saran, pendapat, maupun masukan dari Dewan Mufti suatu saat juga diperlukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan persoalan agama yang terjadi di Rusia. Intinya, walaupun Rusia menganut ideologi sekuler akan tetapi hubungan antara Islam dan Pemerintah Rusia dapat terjalin harmonis.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Adang Sutrisna, "Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam membangun Aliansi Peradaban Dengan Dunia Islam", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia, 2010.
- Ahmad, Akbar S., *Rekonstruksi Sejarah Islam Di Tengah Prularitas Agama Dan*

- Peradaban, Cet-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2005.
- CitraMuslim Tinjauan Sejarah Dan Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Ali Kettani, M., *MinoritasMuslim Di Dunia Dewasa Kini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Alkatiri, Zeffri, Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia Analisis Perlindungan HAM 1991 - 2000, cet ke: 1, Jakarta: FIPB Universitas Indonesia*, 2007.
- Asep Syamsul, M. Romli, *Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Cet Ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Azhar, Muhammad, Filsafat Politik Islam: Perbandingan Antara Islam dan Barat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.*
- Budiman, Arief, *Kebebasan, Negara, Pembangunan Kumpulan Tulisan 1965 - 2005*, Cet Ke-1, Pustaka Alvabet Dan Freedom Institute, 2006.
- Elposito, John L., *Islam In Asia Religion Politics & Society*, New York: Oxford University Press, 1987.
- Fabrurodji, A., Rusia Baru Menuju Demokrasi Pengantar Sejarah dan Latar BelakangBudayanya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.*
- Hadi Eksanto, "Perkembangan Islam DI Uzbekistan Pasca Pemerintahan Uni Soviet 1991 - 2000". Skripsi Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Huntler, Shiren T., Islam In Russia: The Politics Of Identity and Security, Armonk NY: me. Sharpe, 2004.*
- Ibrahim, Diloram, The Islamization Of Central Asia A Case Study Of Uzbekistan Leicester: The Islamic Foundation, 1993.*
- Inayati, "Umat Islam Di Rusia Masa Revolusi 1917 - 1923", Skripsi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Cet- I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa: Mufid, Jakarta: Rieneka Cipta, 1994.

- Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis, Magelang: Indonesiantara, 2001.*
- Lebang, Tomi, Sababat Lama Era Baru (60 Tahun Indonesia - Rusia), Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.*
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintaban Islam Menurut Ibnu Taimiyah, Alih Bahasa: Mufid, Cet I, Jakarta Rieneka Cipta, 1994.*
- Lesmana, Tjipta, *Runtuhnya kekuasaan Komunis, Cet-1, Jakarta: Erwin-Rika Press, 1992.*
- Mas'ood, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990.*
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010.*
- Mujani, Saiful, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.*
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2008.*
- Nor Azizah, "Perjuangan Kemerdekaan Chechnya Pasca Keruntuhan Uni Soviet 1991 - 2000, Skripsi Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Nur, Muhammad, Negara Islam Indonesia No Negara Indonesia Islami Yes: Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern, Cet-1, Yogyakarta: Suka Press, 2011.*
- Polloma, Margent M., *Sosiologi Kontemporer, Alih Bahasa: Yasogama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1987.*
- Ritzer, Gerge, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, edisi kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.*
- Sajdzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1993.*
- Saragih, Simon, *Bangkitnya Rusia Peran Putin Dan Eks KGB, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.*
- Sherly Marlia Listiani, "Motif Presiden Vladimirovich Putin Dalam Meningkatkan Perkembangan Islam Di Rusia (2000 - 2007)." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

Sigit Wicaksono, "Konflik Antara Kelompok Muslim Dan Pro Rusia Pasca Kemerdekaan Tajikistan", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.

Silalahi, Ulbert, *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya, 1999.

Shiren T. Huntler, Islam In Russia: The Politics Of Identity and Security, Armonk NY: me. Sharpe, 2004.

Smith, Mark A., *Islam In The Russian Federation United Kingdom: Defence Academy*, 2006.

Surya, Aji, *Segenggam Cinta dariMoskwa*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Surya, Aji dan Kamasa, Frassminggi, *Geliat Islam di Rusia* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Suyanto, M., Revolusi Organisasi Dengan Memberdayakan Kecerdasan Spiritual, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.

Syamsul, Asep. Romli, *Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, cet ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti,1995.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Yemelianova, Gelena M., *Russia and Islam: A Historical Survey*, New York: Palgrave, 2002.

Din Syamsudin, "Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993)

Marzuki Wahid, Abd. Moqsih Ghazali, "Relasi Islam dan Negara: Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama". Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10, November 2010.

M. Syaminan, "Analisa Pemikiran Politik Islam". *Jurnal Politeia*. Vol 1. No. 1. Januari 2009

Syukron Kamil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3 No. 1, September 2003

- Amri Shikhsaidov, "Islam In Dagestan", <http://www.ca-c.org/dataeng/06.shikhs.shtml> akses 12 Juni 2012
- Aislu Yunosova "Islam Between The Volga River and The Ural Mountains", <http://www.ca-c.org/dataeng/07.yunosova.shtml> akses 17 September 2012
- M. Aji Surya, "Jilbab di Rusia".
<http://ramadan.detik.com/read/2012/07/22/134325/1971591/1435/jilbab-di-rusia> akses 23 Juli 2012
- Mikhail Rschin, "The History Islam Of Islam In Kabardino - Balkaria" ,
[http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=3102](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3102) akses 17 September 2012
- Muhammad Zainun Najib, " Islam di Tatarstan Pusat Kebudayaan Islam di negeri Beruang Merah",
http://www.scribd.com/najib_zainun/d/76240385-Islam-Di-Tatarstan-Pusat-Kebudayaan-Islam-Di-Negeri-Beruang-Merah akses 12 Februari 2012
- Oxana klimenko, Stephen R. Bowers, "North Caucaus Basilene Project: Adygea", Center For Security And Science", 2009
- "Kaum Muslim Rusia Butuh Bantuan Indonesia",
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/11/05/06/lkr681-kaum-muslim-rusia-butuh-bantuan-indonesia>, akses 8 Februari 2012
- "Dagestan, Negeri Islam di Rusia",
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/01/17/lxxl67-dagestan-negeri-islam-di-rusia-1> Akses 12 Februari 2012
- "History Of Islam In Russia",
<http://www.islamrf.ru/eng/news/eheritage/ehistory/6605/> akses 17 April 2012
- "Liberal Democratic Party Of Russia",
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democratic_Party_of_Russia akses 15 Mei 2012
- "Menilik Geliat Islam Di Negeri Beruang Merah". http://www.an-najah.net/index.php?option=com_content&view=article&id=12

8:rfd&catid=67:jelajah&Itemid=89 Akses 8 Februari 2012

- "Momentum Kebangkitan Islam Di Rusia,
http://koran.republika.co.id/koran/0/37421/Momentum_Kebangkitan_Islam_di_Rusia, akses 2 Januari 2012
- "Mengenal Populasi Muslim Dunia (Bagian Pertama",
http://indonesian.tribune.com/asset_publisher/QqB7/content/mengenal-populasi-muslim-dunia-bagian-pertama, akses 7 Februari 2012
- "Muslim Rusia: Antara Shalat, Atheisme, dan Ramadhan,"
<http://www.khalifah.co.id/berita/wawancara/1317-muslim-rusia-antara-sholat-atheisme-ramadhan>, akses, 30 Januari 2012
- "Pokok-Pokok Teori Struktural Fungsional", <http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2180241-pokok-pokok-teori-struktural-fungsional/#ixzz1o0M2kzm8> akses 3 Maret 2012
- Polosin, Ali Vyacheslav, "Secular State and Islamic Tradition In Russia".
<http://islamdag.info/story/1068> akses 6 Agustus 2012.
- "Russia Legislative Election
 2003", http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_legislative_election,_2003
- "Rusia Luncurkan TV Islam 24 Jam"
<http://ramadan.detik.com/read/2012/08/20/195729/1995433/631/rusia-luncurkan-tv-islam-24-jam> akses 28 Agustus 2012
- "Russians Mufties Council", <http://www.muslim.ru/2/cont/68/80/> akses 1 Agustus 2012
- <http://www.demographia.ru/eng/articles/index.html?idR=71&idArt=1928> akses 17 April 2012
- <http://www.muslim.ru/2/cont/68/77/1367.htm> akses 1 Agustus 2012
- http://www.indonesia.mid.ru/aktiv/01_i.html akses 12 Februari 2012